



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2020**



 : 021-384-30669

 : deputi.polhukam@setkab.go.id

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam) Sekretariat Kabinet Tahun 2020 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Deputi Bidang Polhukam dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKj melaporkan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2020, dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Secara umum capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam tahun 2020 yang tercermin dalam indikator kinerja sudah baik (97,59%) dan dapat dicapai mendekati target yang telah ditetapkan. Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi ritme kerja seluruh K/L dan perubahan/penajaman tugas dan fungsi di pertengahan tahun 2020, namun hal tersebut dapat terwujud dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Polhukam. Diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Deputi Bidang Polhukam di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2021

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Fadlansyah Lubis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam) Tahun 2020 memfokuskan pada capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2014-2019, **Tujuan** Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yakni *“Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”* dimana dalam LKj ini akan dituangkan dalam kurun waktu 2 (dua) Periode yakni **Periode Januari – September 2020** dengan Satu **Sasaran** yakni *“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”* dengan 3 Indikator Kinerja dan **Periode Oktober – Desember 2020** dengan Dua Sasaran yakni *“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”* dengan 2 Indikator Kinerja dan Sasaran *“Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”* dengan 2 Indikator Kinerja.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020 untuk periode Januari – September 2020 berdasarkan indikator kinerja *“rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”* seluruhnya berjumlah **373 rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, sebanyak **364 rekomendasi** atau **97,59% disetujui** oleh Sekretaris Kabinet (baik **diteruskan** kepada Presiden dan **disampaikan** kepada Menteri/Pimpinan Lembaga atau **disetujui untuk tidak perlu diteruskan** kepada Presiden dan Menteri/Pimpinan Lembaga dimana rekomendasi tersebut digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam pengambilan keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam). Hanya **9 rekomendasi (2,41%)** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet **turun tanpa** catatan/disposisi/ arahan Sekretaris Kabinet sehingga dikategorikan **tidak disetujui** (5 rekomendasi IKK 1, 2 rekomendasi IKK 2, dan 4 rekomendasi IKK 3), agar rekomendasi yang disampaikan benar-benar mendapat catatan/arahan/dispo Sekretaris Kabinet maka perlu dimonitor secara berkala agar setiap berkas yang diturunkan telah mendapatkan disposisi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sedangkan capaian sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam periode Oktober – Desember 2020 yang tertuang dalam dua sasaran strategis dengan indikator “rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet” seluruhnya berjumlah **88 rekomendasi** (dari 88 rekomendasi tersebut terdapat 3 rekomendasi yang turun tanpa catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet, sehingga capaian rekomendasi yang disetujui sebesar **96,59 %**) dan indikator “rekomendasi alternatif penyelesaian masalah yang mengalami hambatan dan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet” seluruhnya berjumlah **29 rekomendasi** (dari 29 rekomendasi tersebut terdapat 1 rekomendasi yang turun tanpa catatan/arahan/ disposisi Sekretaris Kabinet, sehingga capaian rekomendasi yang disetujui sebesar **96,55 %**). Sehingga seluruhnya ada 113 rekomendasi atau **96,58%** disetujui oleh Sekretaris Kabinet baik untuk diteruskan kepada Presiden atau Menteri/Kepala Lembaga maupun disetujui untuk tidak perlu diteruskan namun perlu ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam dan sebanyak 4 rekomendasi atau **3,42%** dikategorikan tidak disetujui karena turun tanpa ada catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet (3 rekomendasi IKK 1 dan 1 rekomendasi IKK 3).

Dari sisi realisasi anggaran Deputy Bidang Polhukam sampai dengan akhir tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan anggaran sebesar **Rp.1.962.238.182,-** atau **99,01%** dari pagu anggaran setelah revisi pemotongan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp.1.981.779.000,-.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengalami kendala, diantaranya sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat / pegawai;
- b. belum idealnya jumlah SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

RINGKASAN EKSEKUTIF

- c. sarana dan prasarana dukungan IT untuk mempermudah dan mempercepat akses memperoleh data dan mengolahnya dalam menyusun suatu rekomendasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu melakukan diskusi atau *coffee morning*, ikut serta dalam Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Seminar, Diskusi, dan Konferensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM, serta menyetujui kegiatan menghadiri rapat secara daring maupun luring serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di dalam dan luar kota baik. Pengajuan formasi jabatan kepada Biro SDMOT, melakukan rotasi Analis dan Pejabat eselon III dan eselon IV, serta berkoordinasi dengan Biro Umum dan Pusdatin.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang Polhukam telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2020. Terjadinya perubahan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 periode Januari – September 2020 dan periode Oktober – Desember 2020 (yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi baru) diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Polhukam di tahun mendatang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2
2. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum	13
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	13
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020	19
BAB III CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	22
B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja	68
C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
BAB IV PENUTUP	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi SDM Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020	5
Tabel 2.1	Sasaran, Program dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Periode Januari s.d. September 2020	14
Tabel 2.2	Target Anggaran dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Januari s.d. September 2020	14
Tabel 2.3	Target dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Polhukam Januari s.d. September 2020	15
Tabel 2.4	Sasaran, Program dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Periode Oktober s.d. Desember 2020	17
Tabel 2.5	Target Anggaran dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Oktober s.d. Desember 2020	17
Tabel 2.6	Target dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Polhukam Oktober s.d. Desember 2020	18
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam Januari s.d. September 2020	19
Tabel 2.8	Draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam Oktober s.d. Desember 2020	20
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	23
Tabel 3.2	Capaian Rekomendasi (Periode Januari - September 2020)	26
Tabel 3.3	Capaian Indikator Sasaran (Periode Januari - September 2020)	27
Tabel 3.4	Capaian Output Deputi Bidang Polhukam Januari – September 2020	28
Tabel 3.5	Capaian Outcome Deputi Bidang Polhukam Januari – September 2020	29
Tabel 3.6	Capaian Output IKK 1 Deputi Bidang Polhukam Januari – September 2020	30
Tabel 3.7	Capaian Outcome IKK 1 Deputi Bidang Polhukam Januari – September 2020	32
Tabel 3.8	Status Warna Sitap Kedeputian Polhukam	35
Tabel 3.9	Capaian Output IKK 2 Deputi Bidang Polhukam Periode Januari – September 2020	37

DAFTAR TABEL

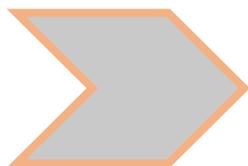
Tabel 3.10	Capaian Outcome IKK 2 Deputi Bidang Polhukam Periode Januari – September 2020	38
Tabel 3.11	Capaian Output IKK 3 Deputi Bidang Polhukam Periode Januari – September 2020	40
Tabel 3.12	Capaian Outcome IKK 3 Deputi Bidang Polhukam Periode Januari – September 2020	41
Tabel 3.13	Capaian Rekomendasi (Periode Oktober - Desember 2020)	44
Tabel 3.14	Capaian Indikator Sasaran (Periode Oktober - Desember 2020)	45
Tabel 3.15	Capaian Output Deputi Bidang Polhukam Periode Okt- Des 2020	47
Tabel 3.16	Capaian Outcome Deputi Bidang Polhukam Periode Okt- Des 2020	47
Tabel 3.17	Capaian Output IKK 1 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt- Des 2020	49
Tabel 3.18	Capaian Outcome IKK 1 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt- Des 2020	51
Tabel 3.19	Capaian Output IKK 2 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt- Des 2020	54
Tabel 3.20	Capaian Outcome IKK 2 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt- Des 2020	54
Tabel 3.21	Capaian Output IKK 3 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt- Des 2020	56
Tabel 3.22	Capaian Outcome IKK 3 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt- Des 2020	57
Tabel 3.23	Capaian Output IKK 4 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt- Des 2020	59
Tabel 3.24	Capaian Outcome IKK 4 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt- Des 2020	60
Tabel 3.25	Capaian Output dan Outcome Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020	61
Tabel 3.26	Ikhtisar Capaian Sasaran Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020	64
Tabel 3.27	Ikhtisar Capaian Sasaran Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020	64

DAFTAR TABEL

Tabel 3.28	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Polhukam Periode Jan-Sep 2020 dan Okt-Des 2020	72
Tabel 3.29	Gambaran Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Capaian Output dan Outcome Deputi Polhukam Jan-Sep 2020	26
Gambar 3.2	Capaian Deputi Polhukam Periode Jan-Sep 2020	27
Gambar 3.3	Capaian Output Deputi Polhukam Periode Januari-September 2020	28
Gambar 3.4	Capaian Outcome Deputi Polhukam Periode Jan-Sep 2020	29
Gambar 3.5	Capaian Output IKK 1 Deputi Polhukam Periode Jan-Sep 2020	31
Gambar 3.6	Capaian Outcome IKK 1 Deputi Polhukam Periode Jan-Sep 2020	32
Gambar 3.7	Capaian Output IKK 2 Deputi Polhukam Periode Jan-Sep 2020	37
Gambar 3.8	Capaian Outcome IKK 2 Deputi Polhukam Periode Jan-Sep 2020	38
Gambar 3.9	Capaian Output IKK 3 Deputi Polhukam Periode Jan-Sep 2020	41
Gambar 3.10	Capaian Outcome IKK 3 Deputi Polhukam Periode Jan-Sep 2020	42
Gambar 3.11	Capaian Output dan Outcome Deputi Polhukam Okt-Des 2020	45
Gambar 3.12	Capaian Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	46
Gambar 3.13	Capaian Output Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	47
Gambar 3.14	Capaian Outcome Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	48
Gambar 3.15	Capaian Output IKK 1 Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	49
Gambar 3.16	Capaian Outcome IKK 1 Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	51
Gambar 3.17	Capaian Output IKK 2 Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	54
Gambar 3.18	Capaian Outcome IKK 2 Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	55
Gambar 3.19	Capaian Output IKK 3 Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	57
Gambar 3.20	Capaian Outcome IKK 3 Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	58
Gambar 3.21	Capaian Output IKK 4 Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	60
Gambar 3.22	Capaian Outcome IKK 4 Deputi Polhukam Periode Okt-Des 2020	60
Gambar 3.23	Capaian Output dan Outcome Deputi Polhukam Tahun 2020	62
Gambar 3.24	Perbandingan Memo dan Surat Deputi Polhukam Tahun 2020	62
Gambar 3.25	Perbandingan Capaian Outcome Tahun 2016.s.d. 2020	65
Gambar 3.26	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 s.d. 2020	73



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka membangun birokrasi yang profesional dan bersih melayani, Pemerintah harus berpijak pada *Good Governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang penting seperti *efisiensi, keadilan* dan *daya tanggap*. Nilai-nilai lainnya seperti *transparansi, penegakan hukum* dan *akuntabilitas publik* juga merupakan nilai-nilai esensial yang berpengaruh pada kinerja pemerintahan yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2020 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut.

B. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Deputi Bidang Polhukam dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan dengan lebih rinci lagi tugas dan fungsinya serta organisasi di bawahnya melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Periode Januari – September 2020).



1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

KEDUDUKAN

Deputi Bidang Polhukam merupakan salah satu dari 6 (enam) Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, Deputi Bidang Polhukam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

TUGAS DAN FUNGSI

Deputi Bidang Polhukam mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Polhukam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;



- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Deputi Bidang Polhukam didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi yakni:

- a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika.

Dalam kurun waktu tahun 2020 telah terjadi perubahan organisasi Sekretariat Kabinet dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan dengan lebih rinci lagi tugas dan fungsinya serta organisasi di bawahnya melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang tentunya juga berdampak pada perubahan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam (Periode Oktober – Desember 2020).

Deputi Bidang Polhukam mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Polhukam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;



- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Polhukam didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi yakni:

- a. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika.

Deputi Bidang Polhukam sampai dengan akhir Desember 2020 memiliki jumlah SDM sebanyak 69 orang yang terdiri dari 47 orang pejabat struktural (eselon I, II, III, dan IV), 20 orang analis (yakni analis bidang hukum, analis bidang polhukam, analis kinerja, analis data, dan penyusun rencana kegiatan dan anggaran), dan 2 orang pengolah data. Selain itu Deputi Bidang Polhukam juga dibantu pegawai tidak tetap (PTT) yang terdiri dari pramubakti berjumlah 5 orang, pramusaji berjumlah 2 orang, dan pengemudi berjumlah 2 orang.

Dari 66 orang pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam, saat ini yang sedang mengikuti studi S2 (program master) ada 2 orang (satu orang di Amerika Serikat dan satu orang di Belanda), sehingga total pejabat dan pegawai yang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya hanya sebanyak 64 orang.



Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Deputi Bidang Polhukam per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

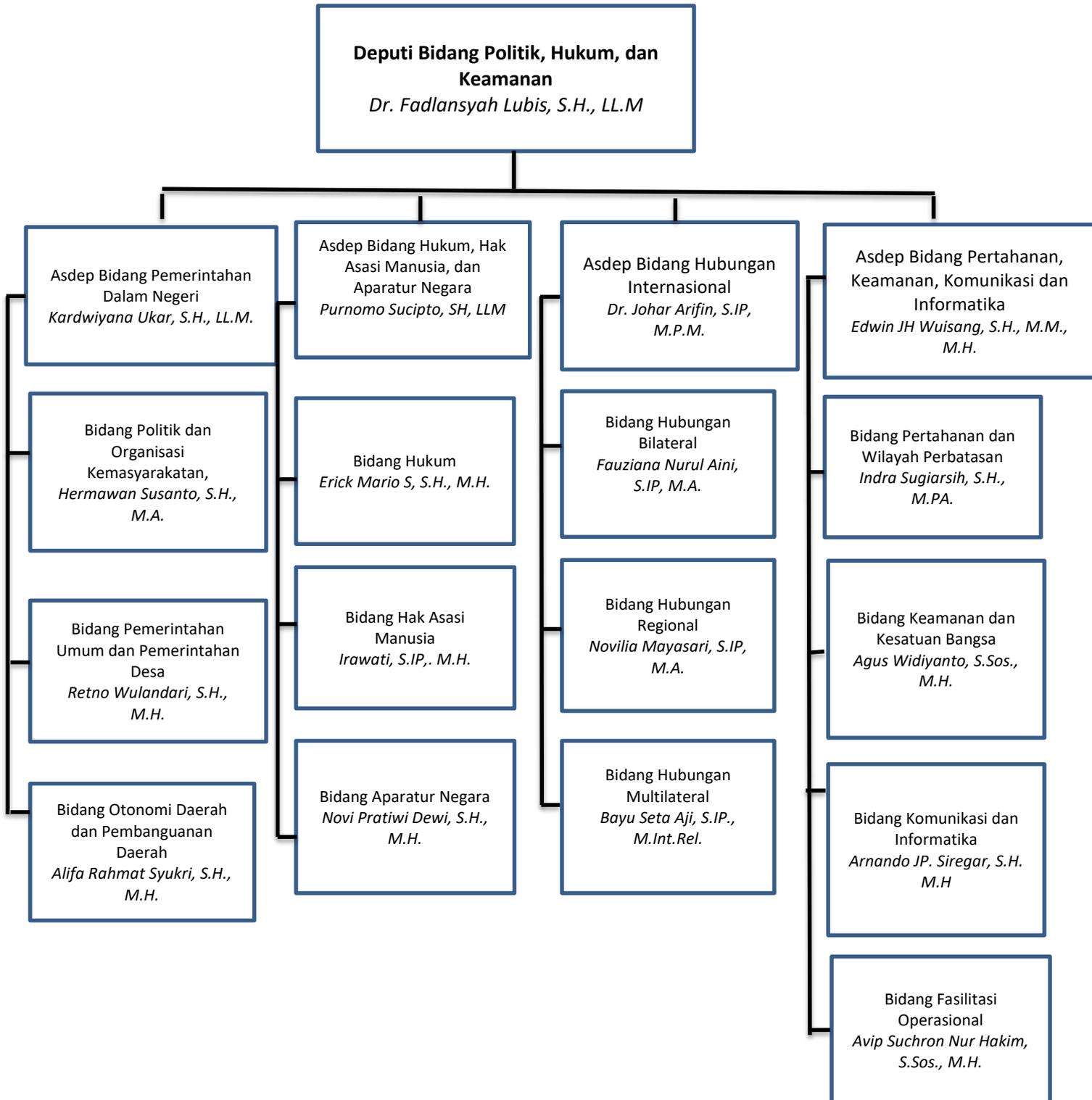
Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat					Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	D3	SMA		L	P	
IV/d	1	Deputi	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
IV/d	1	Asisten Deputi	4	-	1	-	-	-	1	1	-	1
IV/c	2			1	1	-	-	-	2	2	-	2
IV/b	1			-	1	-	-	-	1	1	-	1
IV/b	6	Kepala Bidang	13	-	6	-	-	-	6	3	3	5
IV/a	5			-	5	-	-	-	5	2	3	5
III/d	2			-	2	-	-	-	2	2	-	2
III/d	11	Kepala Subbidang	26	-	9	2	-	-	11	5	6	11
III/c	15			-	5	10	-	-	15	4	11	15
III/b	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	-	Analisis (sedang S2)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/c	2			-	-	2	-	-	2	-	2	2
III/a	18	Analisis	18	-	-	18	-	-	18	9	9	11
III/a	-	CPNS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	1	Pengolah Data	2	-	-	1	-	-	1	1	-	1
II/d	1			-	-	-	1	-	1	-	1	1
Jml	66		66	2	30	33	1	0	66	31	35	66

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Deputi Bidang Polhukam sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:



ORGANISASI DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET





C. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dengan tugasnya memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputy Bidang Polhukam dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Melalui tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Polhukam merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral yang dituntut untuk dapat memberikan analisis, pandangan atau pemikiran di bidang politik, hukum, dan keamanan secara profesional dan berkualitas tanpa ada intervensi dari manapun.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan, Deputy Bidang Polhukam berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*, terutama kebijakan dan program di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diarahkan dan menjadi perhatian prioritas Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang Polhukam terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Deputy Bidang Polhukam juga bertugas menangani isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang politik dalam negeri, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, hubungan internasional, pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Selain itu Deputy Bidang Polhukam juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang



akan diambil Presiden. Serta memastikan bahwa arahan Presiden yang disampaikan dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang dihadiri Presiden telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/instansi terkait baik pusat maupun daerah.

Di pertengahan tahun 2020 Sekretariat Kabinet telah merumuskan tugas dan fungsi baru yang cukup strategis dalam mendukung pelaksanaan manajemen kabinet yakni memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang mendapatkan persetujuan Presiden serta penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Dua fungsi baru tersebut sangat strategis sehingga dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi yang andal dan berkesinambungan.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Deputy Bidang Polhukam memiliki aspek-aspek strategis lainnya dalam yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Polhukam dengan mengikutsertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Polhukam dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Meskipun secara kuantitas belum memenuhi kebutuhan standar jumlah sumber daya manusia bagi suatu organisasi setingkat eselon I, tetapi dalam segi latar belakang pendidikan sebanyak 50,74% berlatar belakang S2 Dalam dan Luar Negeri dimana saat ini ada 2 (dua) orang sedang menjalani pendidikan S2 di Amerika Serikat dan Belanda.

2. Aspek Keuangan/Anggaran



Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Deputy Bidang Polhukam. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Penggunaan anggaran dibuat seefisien dan seefektif mungkin, dengan anggaran yang ada diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang menjadi perhatian/prioritas Presiden yakni monev arahan Presiden dan keikutsertaan dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan di K/L terkait. Tahun 2020 untuk pertama kalinya seluruh unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Polhukam mendapatkan anggaran di atas 1 (satu) Milyar sehingga dalam pencapaian rencana kegiatannya dapat maksimal dilaksanakan.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam serta memberi masukan untuk membangun aplikasi berbasis teknologi informasi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Deputy Bidang Polhukam masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputy Bidang Polhukam untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal



tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Deputi Bidang Polhukam terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. Belum terpenuhinya jumlah analisis yang ideal untuk setiap jenjang jabatan eselon IV (Kepala Subbidang)

Meningkatnya peran Deputi Bidang Polhukam dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, kondisi saat ini kapasitas dan kompetensi SDM belum merata pada masing-masing bidang. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang Polhukam saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu SDM yang ada saat ini belum sesuai dengan kondisi idealnya karena masih ada beberapa Kepala Subbidang yang hanya memiliki 1 (satu) orang analis yang tentunya karena baru diisi oleh PNS maka *gap* kemampuan dalam melakukan analisis terbuka lebar dengan atasannya sehingga perlu perhatian khusus dari pimpinan untuk meningkatkan kemampuan analisis mereka.

b. Masih lemahnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Polhukam harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/ instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan cepat serta akurat untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang Polhukam juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih



profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang memadai dan berbasis teknologi informasi.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputy Bidang Polhukam diantaranya meliputi:

a. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputy Bidang Polhukam yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan diskusi terfokus baik yang diselenggarakan oleh masing-masing unit kerja di Kedeputusan Bidang Polhukam maupun oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana serta instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam berdasarkan *talent mapping*.

b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

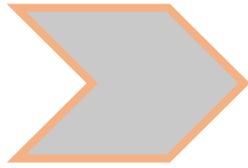
Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparaturnya pemerintah.

c. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan



untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet. Pusdatin perlu segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam pada khususnya dan Sekretariat Kabinet pada umumnya melalui penyelenggaraan *e-government*.



BAB II PERENCANAAN KERJA

A. Gambaran Umum

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet pada Mei 2020.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Periode Januari s.d. September 2020

Pada awal tahun 2020, Deputi Bidang Polhukam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet, Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Polhukam, rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

**SASARAN: TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS
DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Pemilihan sasaran tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam yakni berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi kebijakan yang berkualitas bidang politik, hukum, dan keamanan.



Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **3 (tiga) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan**. Empat kegiatan dimaksud juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masing-masing Asisten Deputy yang ada di lingkungan Deputy Bidang Polhukam.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Deputy Bidang Polhukam pada tahun 2020 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Sasaran, Program dan Kegiatan Deputy Bidang Polhukam
Periode Januari s.d. September 2020

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri 2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara 3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional 4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputy Bidang Polhukam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Anggaran dan Kegiatan Deputy Bidang Polhukam
Periode Januari s.d. September 2020

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Politik Dalam Negeri (Kode Kegiatan: 5015)	Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Kode Kegiatan: 5016)	Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional (Kode Kegiatan: 5018)	Rp.1.500.218.000,- (satu milyar lima ratus juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)



KEGIATAN	ANGGARAN
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika (Kode Kegiatan: 5017)	Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG POLHUKAM TAHUN 2020	Rp.6.525.218.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Target dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Polhukam
Periode Januari s.d. September 2020

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2020. Pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020, Deputy Bidang Polhukam tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** dengan pertimbangan bahwa semua rekomendasi di bidang polhukam harus berkualitas dalam arti disetujui oleh Sekretaris Kabinet.



Periode Oktober s.d. Desember 2020

Pada awal bulan Oktober 2020, Deputy Bidang Polhukam telah menetapkan kembali Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk 3 bulan kedepan yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet, Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Polhukam, terdapat 2 (dua) rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

SASARAN 2 : TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Rumusan sasaran tersebut merupakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam yang baru tertuang dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan yaitu rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan dan rekomendasi hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan dan rekomendasi hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Kedua Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **4 (empat) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam. Keempat indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan**. Empat kegiatan dimaksud juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masing-masing Asisten Deputy yang ada di lingkungan Deputy Bidang Polhukam.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Deputy Bidang Polhukam sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja periode Oktober - Desember 2020 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:



**Tabel 2.4
Sasaran, Program dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam
Periode Oktober s.d. Desember 2020**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri 2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara 3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional 4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputi Bidang Polhukam adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5
Target Anggaran dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam
Periode Oktober s.d. Desember 2020**

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Politik Dalam Negeri (Kode Kegiatan: 5015)	Rp.250.019.411,- (dua ratus lima puluh juta sembilan belas ribu empat ratus sebelas rupiah)
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Kode Kegiatan: 5016)	Rp.334.197.035,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional (Kode Kegiatan: 5018)	Rp.361.008.982,- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika (Kode Kegiatan: 5017)	Rp.374.139.100,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG POLHUKAM TAHUN 2020	Rp.1.319.364.528,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)



Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Target dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Polhukam
Periode Oktober s.d. Desember 2020

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
2	Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahun 2020 sesuai dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet dan dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Polhukam Tahun 2020 (Oktober – Desember) untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2020.



C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Polhukam pada tahun 2020 pada dokumen Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Polhukam Tahun 2020, maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

Periode Januari – September 2020

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Polhukam
Periode Januari s.d. September 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris KabinetPersentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris KabinetPersentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet

Periode Oktober – Desember 2020

Untuk Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Polhukam pada periode Oktober - Desember 2020 belum ditetapkan dokumen Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Polhukam, saat ini masih berupa draft yang tetap masih dapat digunakan yakni:

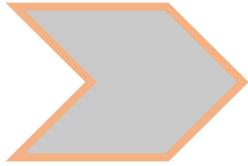


Tabel 2.8
Draft
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Polhukam
Periode Oktober s.d. Desember 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Polhukam dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan



NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan



BAB III CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputy Bidang Polhukam) Tahun 2020 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Polhukam yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja maupun peningkatan kinerja Deputy Bidang Polhukam secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Deputy Bidang Polhukam.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Deputy Bidang Polhukam telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Deputy Bidang Polhukam. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.



Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Deputi Bidang Polhukam terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja, sehingga hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II dibawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	≥ 100	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70 % - <85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Cukup
5	< 55%	Kurang Baik

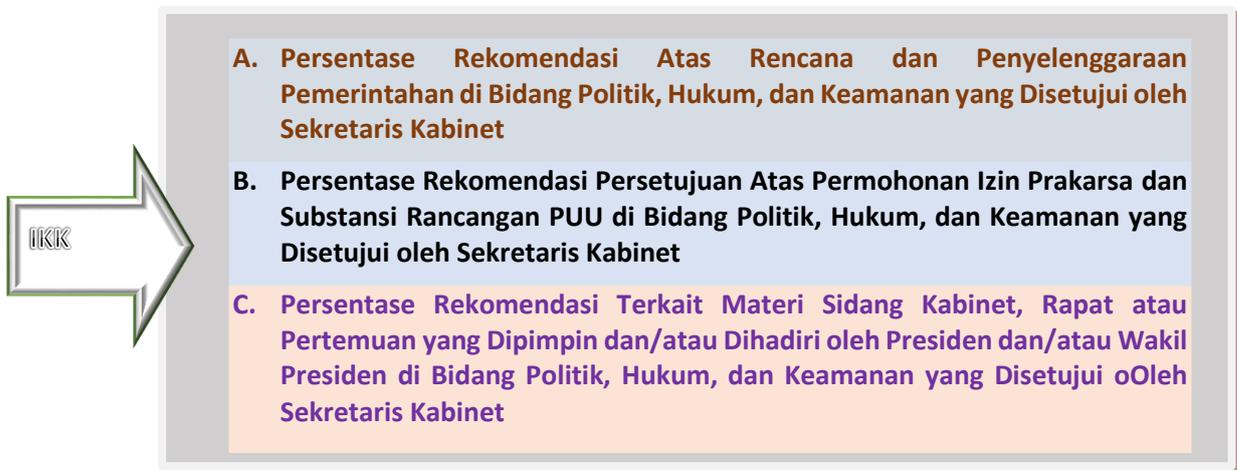
A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2020, seiring perubahan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Mei 2020 dengan terbitnya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020. Secara umum Deputi Bidang Polhukam tidak mengalami perubahan nomenklatur, sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam struktur tersebut, nomenklatur unit eselon I menggambarkan tugas dan fungsi yang secara garis besarnya menyiapkan rekomendasi yang berkualitas di bidang Polhukam dalam bentuk rekomendasi kebijakan, rekomendasi izin



prakarsa, dan rekomendasi materi sidang Kabinet yang telah ditetapkan menjadi Sasaran Strategis Deputi Polhukam pada Periode Januari-September 2020, yakni sebagai berikut.

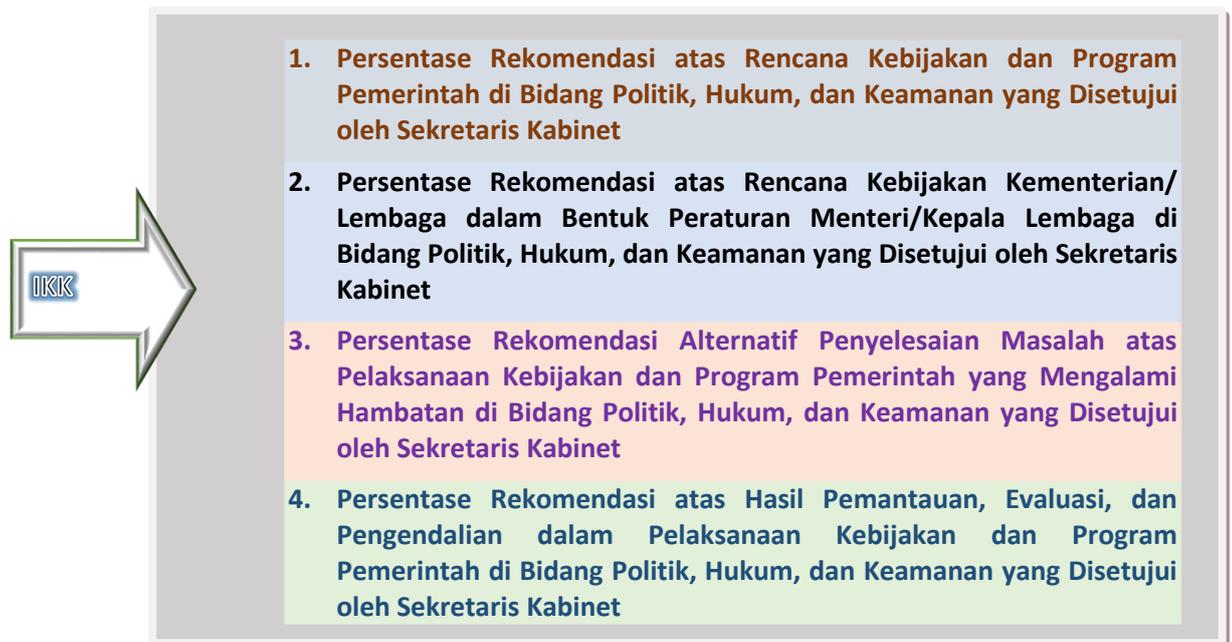


Secara umum Capaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Periode Januari-September 2020 terlihat pada tangkapan layar *dashboard SIKT2* di bawah ini.





Selanjutnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2020 dengan telah dilantiknya seluruh pejabat eselon I s.d. eselon IV di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, telah ditetapkan Sasaran Strategis sebanyak 2 buah dan Indikator Kinerja sebanyak 4 buah (masing-masing Sasaran Strategis memiliki 2 Indikator Kinerja) sebagaimana berikut ini.



Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, Deputi Bidang Polhukam telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut. Dalam Laporan Capaian Kinerja berikut akan diuraikan capaian dalam kurun waktu 2 Periode yakni Periode Januari – September 2020 (menggunakan 1 Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja) dan Periode Oktober – Desember 2020 (menggunakan 2 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja).



Secara umum Capaian Kinerja Deputy Bidang Polhukam Periode Oktober-Desember 2020 terlihat pada tangkapan layar *dashboard SIKT2* di bawah ini.



Capaian Kinerja Deputy Bidang Polhukam

Periode Januari – September 2020

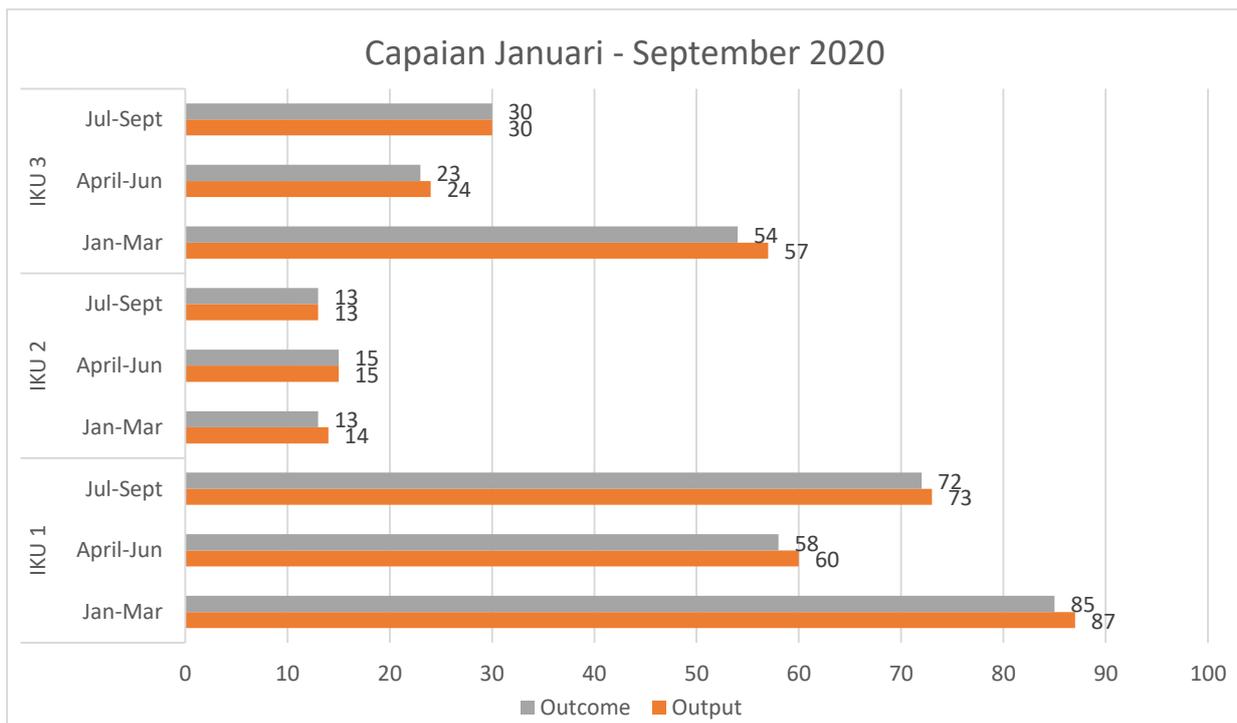
Secara garis besar Deputy Polhukam telah menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet terkait dengan penyampaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Polhukam berupa rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Polhukam.

Secara garis besar **capaian kinerja Deputy Bidang Polhukam** dalam mencapai Sasaran Strategis Periode Januari - September 2020 ini adalah sebesar **97,59%** atau tergolong dalam kategori **sangat baik** (karena capaian sasaran sebesar 97,59% berada pada rentang 85% - 100%).

Tabel 3.2
Capaian Rekomendasi
(Periode Januari - September 2020)

Rekomendasi	Output	Outcome	% CAPAIAN
1. Rekomendasi Kebijakan (memorandum dan surat Sekretaris Kabinet)	220	215	97,73%
2. Rekomendasi Izin Prakarsa dan Substansi RPUU serta Rancangan yang ditetapkan Presiden	42	41	97,62%
3. Rekomendasi Materi Sidang, Butir Wicara, dan Arahan Presiden	111	107	96,40%
Total	373	364	97,59

Gambar 3.1
Capaian Output dan Outcome Kedeputian Polhukam
Periode Januari - September 2020



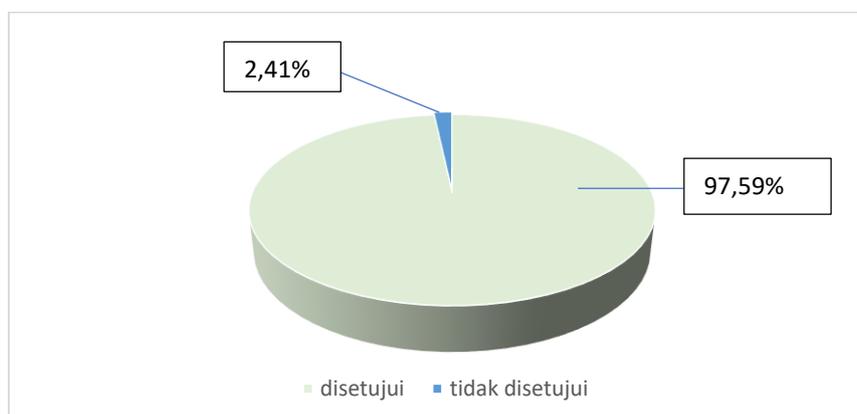
Uraian mengenai capaian indikator sasaran, yaitu capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam dari mulai 1 Januari sampai dengan 30 September 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran
Periode Januari - September 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	97,73%	97,73%
2.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	97,62%	97,62%
3.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	96,40%	96,40%

Dari ketiga indikator sasaran di atas, persentase realisasi output yang dicapai Kedeputian Bidang Polhukam periode Januari – September 2020 didapat total realisasi capaian sebesar **97,59% telah disetujui** Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan diteruskan kepada Pimpinan Kementerian/ Lembaga untuk ditindaklanjuti, serta diberikan catatan/arahan/disposisi kepada Deputy untuk ditindaklanjuti) dan **2,41% tidak disetujui** oleh Sekretaris yakni atas rekomendasi tersebut Sekretaris Kabinet tidak memberikan catatan/arahan/disposisi (berkas turun tanpa ada catatan Sekretaris Kabinet), sehingga tidak diketahui secara pasti apakah terhadap rekomendasi tersebut disetujui atau tidak oleh Sekretaris kabinet.

Gambar 3.2
Capaian Deputy Polhukam
Periode Januari - September 2020



Pada periode Januari - September 2020, Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan telah menghasilkan output sebanyak 373 rekomendasi. Dari 373 rekomendasi yang dihasilkan tersebut sebanyak **364 rekomendasi disetujui** oleh Sekretaris Kabinet (97,59%) dan ada **9 rekomendasi yang tidak disetujui** oleh Sekretaris Kabinet (2,41%), rekomendasi yang tidak disetujui tersebut merupakan rekomendasi yang tidak terdapat catatan/disposisi/petunjuk Sekretaris Kabinet pada berkas dimaksud sehingga tidak diketahui apakah rekomendasi tersebut apakah benar-benar telah digunakan oleh Sekretaris Kabinet atau tidak.

Tabel 3.4
Capaian Output Deputi Bidang Polhukam Periode Jan-Sep 2020

	Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
Total	154	166	53	373

Gambar 3.3
Capaian Output Deputi Polhukam
Periode Januari - September 2020

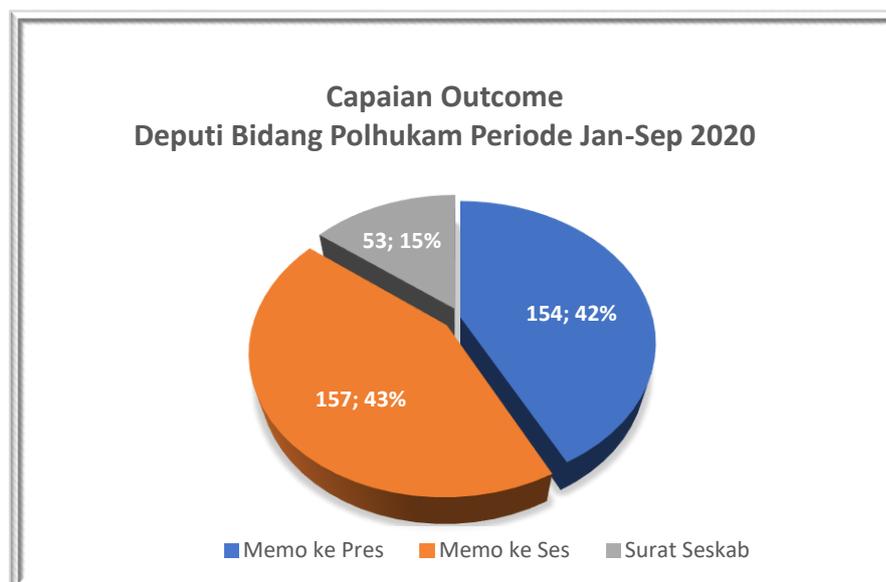


Tabel 3.5
Capaian Outcome Deputi Bidang Polhukam Periode Jan-Sep 2020

	Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
Total	154	157	53	364

Sebagaimana terlihat dari Tabel 3.5 di atas, dari **364 rekomendasi** yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet terdiri dari **311 rekomendasi berupa memo** (85,44%) dan **53 rekomendasi berupa surat** Sekretaris Kabinet yang diteruskan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/Publik (14,56%). Dari **311 rekomendasi** berupa memo terdapat **154 rekomendasi** atau sebesar 49,52% rekomendasi tersebut **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet **untuk disampaikan** kepada Presiden dan **157 rekomendasi** atau sebesar 50,48% **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet **untuk tidak disampaikan** kepada Presiden, namun oleh Sekretaris Kabinet rekomendasi tersebut diberikan catatan/arahan/disposisi untuk ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.

Gambar 3.4
Capaian Outcome Deputi Polhukam Jan- Sep 2020





Indikator Kinerja 1

Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

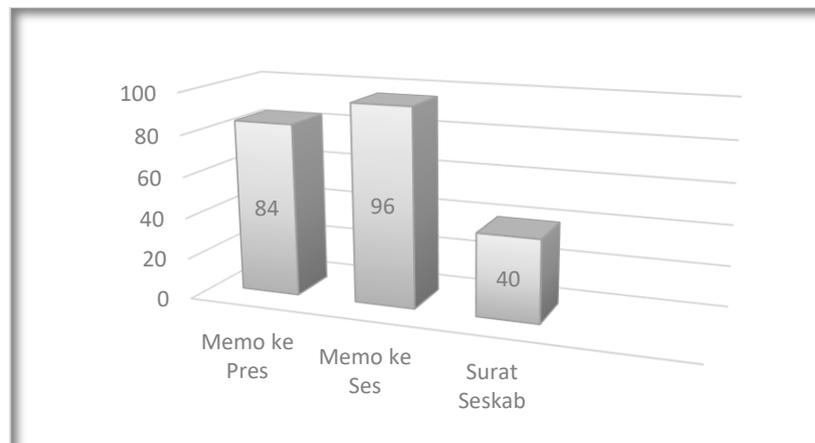
Kualitas rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stake holders* maupun kepada Sekretaris Kabinet sendiri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama mencapai **98,18% (Sangat Baik)** dari keseluruhan jumlah rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) yang kemudian disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal tersebut terlihat bahwa dari **220 (dua ratus dua puluh) rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, sebanyak **216 (dua ratus enam belas) rekomendasi disetujui** oleh Sekretaris Kabinet untuk diteruskan/disampaikan kepada Presiden dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta disetujui untuk tidak perlu diteruskan/disampaikan, namun memberikan arahan kepada Deputi Bidang Polhukam untuk menindaklanjutinya.

Sebagaimana terlihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

Tabel 3.6
Capaian Output IKK I Deputi Bidang Polhukam
Periode Januari-September 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
84	96	40	220

Gambar 3.5
Capaian Output IKK 1 Deputy Polhukam Jan- Sep 2020



Rekomendasi yang disetujui disini telah memenuhi kriteria:

1. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan atau bahan alternatif yang dapat dipakai Presiden untuk memutuskan suatu kebijakan atau hanya untuk dibaca/diketahui Presiden sebagai referensi dan/atau *second opinion*.
2. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi terkait untuk diketahui sebagai referensi atau ditindaklanjuti sesuai kewenangannya (baik berupa surat maupun memorandum Sekretaris Kabinet).
3. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam mengambil suatu kebijakan/keputusan atau dijadikan sebagai bahan referensi dalam pertemuan dengan Presiden atau instansi terkait atau audiensi dari utusan Negara sahabat, organisasi kemasyarakatan atau publik lainnya.
4. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam disetujui untuk tidak diteruskan kepada Presiden, Menteri atau Pimpinan Lembaga atau Kepala Daerah, terhadap rekomendasi tersebut Sekretaris Kabinet memberikan arahan/ catatan/disposisi kepada Deputy Bidang Polhukam untuk menindaklanjutinya.

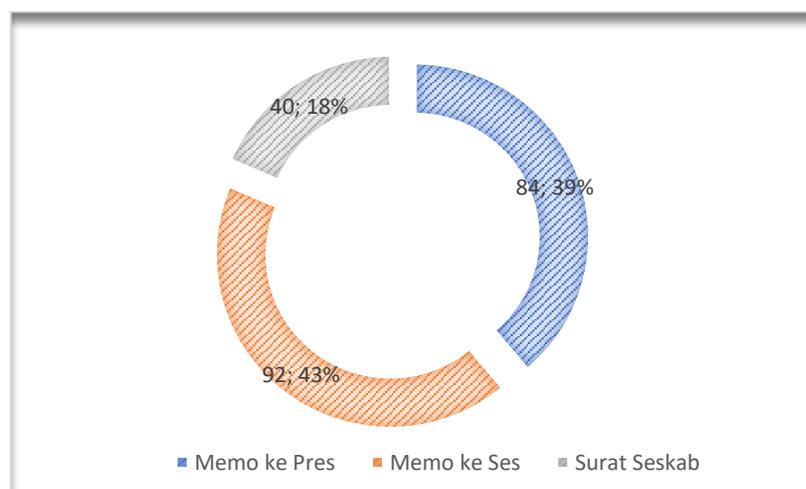
Di periode Januari-September 2020 ada sebanyak 4 rekomendasi bidang polhukam (1,82%) yang tidak mendapat respon Sekretaris Kabinet, terhadap ke-lima rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, namun turun tanpa ada catatan/disposisi Sekretaris Kabinet, sehingga dikategorikan tidak disetujui.

Dari 216 rekomendasi sasaran indikator kinerja tersebut yang dihasilkan pada periode ini sebanyak 84 memo rekomendasi atau sebesar 38,89% diteruskan ke Presiden sedangkan 92 memo rekomendasi atau 42,59 % hanya ditujukan kepada Sekretaris Kabinet serta 40 rekomendasi berupa surat atau 18,52% disampaikan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Capaian Outcome IKK 1 Deputy Polhukam
Periode Januari-September 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
84	92	40	216

Gambar 3.6
Capaian Outcome IKK 1 Deputy Polhukam
Periode Januari-September 2020





Beberapa rekomendasi IKK 1 Bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dalam kurun waktu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Isu-isu krusial bernilai strategis:

1. Penyelesaian Permasalahan Lahan Warga Masyarakat Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT Sanggar Agro Karya Persada.
2. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Wilayah Sumatera Utara.
3. Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Membahas Isu Papua.
4. Penyampaian Hasil Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44 P/HUM/2019 Mengenai Uji Materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
5. Penyampaian Hasil Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44 P/HUM/2019 Mengenai Uji Materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
6. Penyelenggaraan Seminar Kerja Sama Legislatif antara Indonesia-Korea Tahun 2020.
7. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Penataan Lembaga Nonstruktural.
8. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* mengenai Problematika Pengelolaan Aset Negara.
9. Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat.
10. Pemberian Bantuan Pemerintah RI terkait Kegiatan Kemanusiaan di Negara Sahabat.
11. Kajian Penanganan Corona Virus Disease 2019.
12. Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi Internasional (OI).
13. Permohonan Dukungan Presiden RI terhadap *World Conference Against Atomic and Hydrogen Bombs*.
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengembangan Alutsista.
15. Kajian Membangun Sistem Pertahanan Negara dalam Menghadapi Potensi Ancaman Nirmiliter Seperti Wabah Penyakit Menular.
16. Laporan Perkembangan Terkini Program Kerja Sama Pembangunan Kapal Selam U-209 Antara RI-Korea Selatan.
17. Pembentukan Kejaksaan Negeri Baru.
18. Rekomendasi atas Permohonan Perubahan Susunan Organisasi TNI.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.093 /Sekab/Polhukam/06 /2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Arah Presiden RI tentang Pemohonan Penyalinan Bantuan Dana Hibah Kepada Pemerintah Nauru

Jakarta, 25 Juni 2020
Kepada Yth:
1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Keuangan
di
Jakarta

Menyuk Surat Menteri Luar Negeri Nomor: 215/DM/06/2020/09/01 tanggal 5 Juni 2020 kepada Presiden RI perihal Pemohonan Penyalinan Bantuan Dana Hibah kepada Pemerintah Nauru (salinan surat lentering), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan berupa: "tidak lanjut sesuai aturan."

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar peralihan peruntukan dana bantuan hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Nauru yang semula untuk pembelian kapal tongkang dan tug boat menjadi pembelian kapal perantara (landing craft) dapat direalisasikan pada kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerja sama para Menteri, kami sampaikan terima kasih

Sekretaris Kabinet,
Anindyo Anung

Tembusan Yth:
Presiden RI, sebagai laporan

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0197 /Sekab/Polhukam/05/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Penyampaian Kajian Lesson Learned Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tiongkok, Korea Selatan, Filipina, Italia, Prancis, Amerika Serikat, Arab Saudi, Iran dan Mesir, periode kajian: 1-28 April 2020

Jakarta, 12 Mei 2020
Kepada Yth:
Menteri Koordinator, Menteri dan Kepala Lembaga (daftar terlampir)
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Kajian Lesson Learned Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terhadap 9 (sembilan) negara yaitu: Tiongkok, Korea Selatan, Filipina, Italia, Prancis, Amerika Serikat, Arab Saudi, Iran dan Mesir, yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, periode kajian 1-28 April 2020.

Kajian secara umum berisi gambaran data dan kronologi pandemi Covid-19 di masing-masing negara tersebut, kebijakan penanganan dan implementasinya, implikasi dan kendala kebijakan, serta lesson learned bagi Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi best practices dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan kondisi negara dan rakyat Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Menteri Koordinator, Menteri, dan Kepala Lembaga, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,
Anindyo Anung

Tembusan Yth:
Presiden RI, sebagai laporan

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0199 /Sekab/ Polhukam/ 12 /2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Prosedur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional

Jakarta, 1 Desember 2020
Kepada Yth:
Menteri Luar Negeri
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Luar Negeri Nomor: 4417/112020/07/01 tanggal 3 November 2020 kepada Presiden perihal Pemohonan Peninjauan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Prosedur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri tersebut dapat disetujui untuk segera ditetapkan Menteri menjadi Peraturan Menteri, dengan ketentuan mengubah naskah Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana hasil kesepakatan pada rapat pembahasan tanggal 24 November 2020. Adapun perubahan-perubahan dimaksud bertujuan untuk memberikan penguatan pada Menteri Luar Negeri sebagai pengarah tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, yaitu pada pengalihan mengenai Laporan Penyerahan Keanggotaan Indonesia, Penghentian Keanggotaan Indonesia, dan Tata Kerja Kelompok Kerja Naskah Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana terlampir.

Karena Menteri dapat menindaklanjuti hal tersebut dalam waktu tidak terlalu lama dan melaporkan kembali perkembangan penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Prosedur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.

Demikian, untuk menjadi perhatian Menteri.

Sekretaris Kabinet,
Anindyo Anung

Tembusan Yth:
1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara, dan
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

**WORLD CONFERENCE
AGAINST ATOMIC & HYDROGEN BOMBS**

Organizing Committee: 2-44 Yasuoka, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8664 JAPAN
Phone: +81-3-5842-8034 Fax: +81-3-5842-6033 E-mail: info@antatom.org

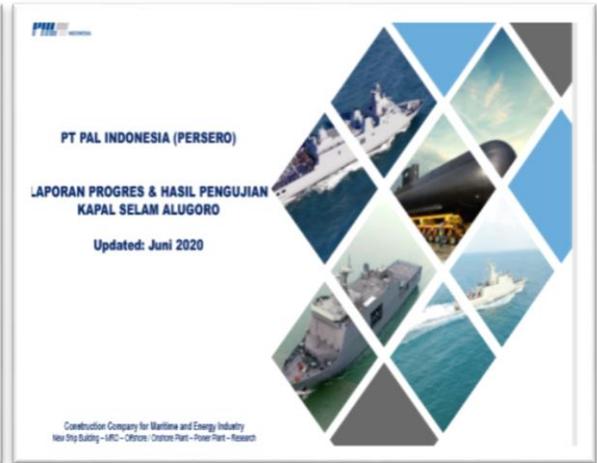
Mr. Joko Widodo
President
Republic of Indonesia

September 20, 2019

Dear Sir,

It is a great pleasure of informing you that the 2019 World Conference against Atomic and Hydrogen Bombs was successfully held on Aug. 3-9 in the two victim cities, with the theme "For a nuclear weapon-free, peaceful and just world." It is an honor for us to send you the documents adopted in the Conference: The "Declaration of International Meeting" and "Letter from Nagasaki to All National Governments".

The Conference was joined by a total of 84 overseas delegates from 21 countries representing national governments, anti-nuclear peace movements and individuals. From across Japan, about 1300 people joined in Hiroshima and about 5000 in Nagasaki.



Selain penyiapan rekomendasi terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Polhukam, Kedepuitan Polhukam juga melaksanakan kegiatan memonitoring tindak lanjut Arahan Presiden melalui aplikasi SITAP (Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden), dimana sampai dengan tahun 2020 status warna atas monitoring tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8
Status Warna Sitap Kedepuitan Polhukam**

NO	TAHUN	JUMLAH DISPOSISI	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH LAPORAN	INDIKATOR WARNA			
					H	K	M	A
1	2020	18	35	14	13	0	1	0
2	2019	14	24	24	16	1	7	0
3	2018	18	27	27	20	7	0	0
4	2017	20	29	29	22	7	0	0
5	2016	20	30	30	24	6	0	0
6	2015	16	12	12	11	1	0	0
7	2014	7	3	3	3	0	0	0
JUMLAH		113	160	139	109	22	8	0

Ket:

- Warna Hijau : Selesai / Progress On Track
- Warna Kuning : Perlu Kerja Keras
- Warna Merah : Sulit Terwujud
- Warna Abu-Abu : Belum di Nilai



Dari Tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa setiap tahun Deputi Bidang Polhukam mendapatkan Arahan Presiden berdasarkan arahan Wakil Sekretaris Kabinet untuk ditinjaklanjuti dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama mitra kerja Deputi Bidang Polhukam (diinput di SITAP). Dari kegiatan yang sudah disepakati tersebut akan dimonitor sampai sejauh mana kemajuan pelaksanaannya melalui laporan yang diinput dalam SITAP dan diberikan tanda apakah sudah selesai sesuai target (warna hijau), perlu diselesaikan dengan kerja keras (warna kuning), sulit diwujudkan di tahun tersebut (warna merah), belum dinilai karena belum ada kegiatan yang tertuang dalam SITAP.

Indikator Kinerja 2

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Dalam periode Januari-September 2020, Kedeputian Bidang Polhukam telah menghasilkan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi atas suatu rancangan PUU bidang Polhukam yang **disampaikan** kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **42 rekomendasi**, dari **42 rekomendasi** yang diajukan sebanyak **41 rekomendasi** atau (97,62%) diantaranya disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan terdapat 1 rekomendasi yang masuk kategori tidak disetujui karena berkas rekomendasi tersebut turun tanpa ada catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi persetujuan prakarsa/substansi ini dapat berupa surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Instansi yang berisi persetujuan kepada Menteri/Pimpinan untuk melanjutkan penyusunan suatu RPUU atau memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden atau Rancangan Keputusan Presiden atau Rancangan Instruksi Presiden untuk ditandatangani Presiden.

Terkait dengan substansi RPUU dapat berupa memorandum laporan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet berupa masukan yang diberikan dalam

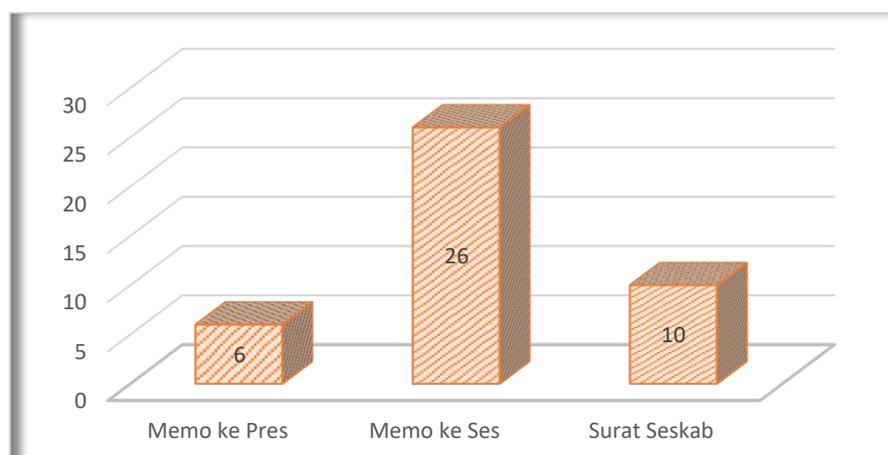
suatu rapat pembahasan RPUU yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi terkait maupun yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet. Selain itu dapat juga berupa naskah surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang berisi catatan atas permohonan penyusunan suatu RPUU agar dikaji kembali atau dirumuskan ulang agar tidak terjadi tumpang tindih, multi tafsir atau bertentangan dengan PUU lainnya.

Dari 42 rekomendasi sasaran indikator kinerja 2 yang dihasilkan pada tahun 2020 sebanyak 6 rekomendasi (memo) atau sebesar 14,29% diteruskan ke Presiden, 10 rekomendasi atau 23,81% berupa surat Sekretaris Kabinet kepada Pimpinan K/L, sedangkan 26 rekomendasi (memo) atau 61,90% hanya sampai ke Sekretaris Kabinet sebagai laporan dan ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam. Dari 26 rekomendasi tersebut terdapat 1 rekomendasi yang turun tanpa ada catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet sehingga dikategorikan tidak disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3.9
Capaian Output IKK 2 Deputy Bidang Polhukam Periode Jan-Sep 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
6	26	10	42

Gambar 3.7
Capaian Output IKK 2 Deputy Polhukam Jan- Sep 2020

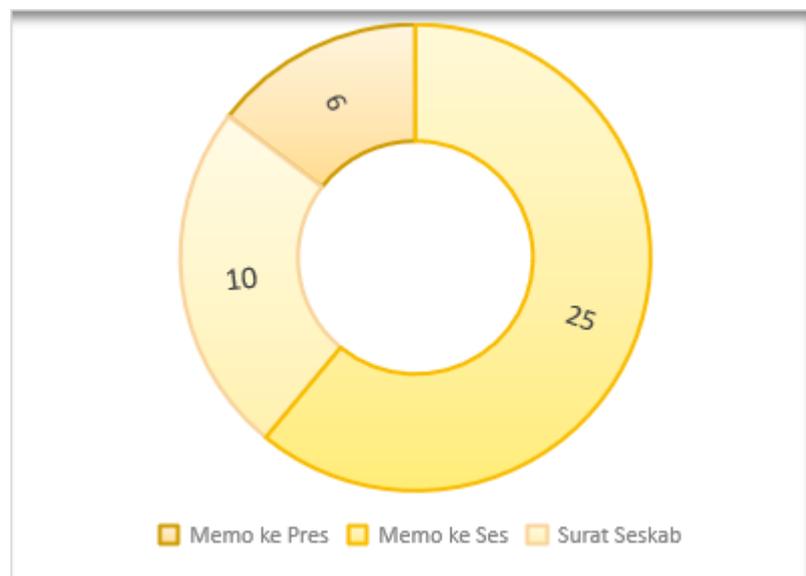


Dalam kurun waktu Januari-September 2020, Deputi Bidang Polhukam untuk capaian IKK 2 telah menghasilkan 41 rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dari 42 rekomendasi yang diajukan atau capaian sebesar 97,62%. Terdapat 1 rekomendasi yang tidak disetujui oleh Sekretaris Kabinet karena terhadap berkas rekomendasi tersebut tidak ada catatan/arahan/ disposisi Sekretaris Kabinet, sebagaimana tergambar dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.10
Capaian Outcome IKK 2 Deputi Bidang Polhukam Periode Jan-Sep 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
6	25	10	41

Gambar 3.8
Capaian Outcome IKK 2 Deputi Polhukam Jan- Sep 2020

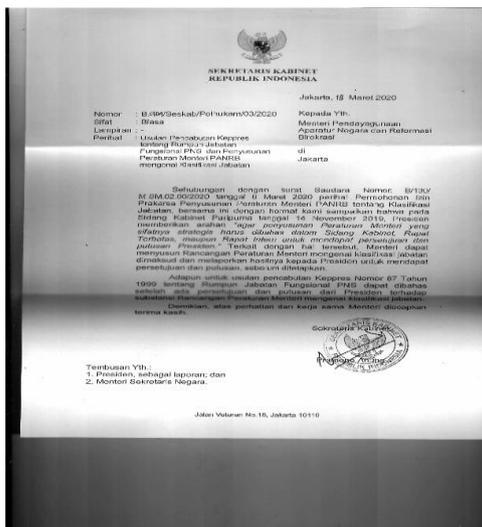


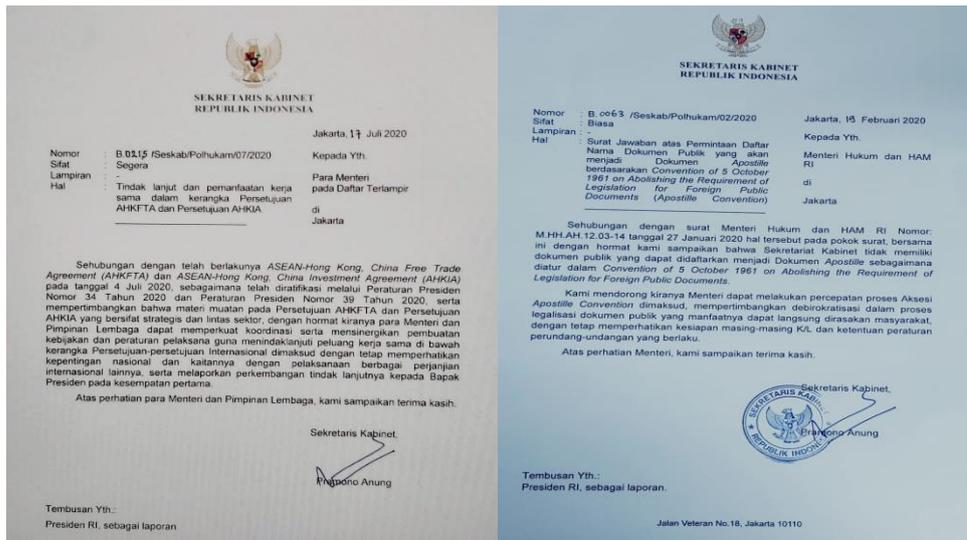
Beberapa rekomendasi IKK 2 Bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dalam kurun waktu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara.
2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara.



4. Pembentukan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
5. Rapat Koordinasi mengenai Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain serta Pemburuan terhadap Terpidana/Aset Hasil Tindak Pidana.
6. Restruktur Organisasi Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Utusan Khusus Presiden untuk Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Mekanisme Nonyudisial.
8. Pencabutan Keppres tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS dan Penyusunan Peraturan Menteri PANRB mengenai Klasifikasi Jabatan.
9. Kerja Sama Internasional dalam rangka Kerangka Persetujuan AHKFTA dan AHKIA.
10. Kerja Sama Internasional dalam rangka Kerangka Persetujuan Permintaan Daftar Nama Dokumen Publik yang akan menjadi Dokumen Apostille.
11. Penyusunan dan Penetapan Keppres tentang Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia.
12. Penyusunan Rancangan Perpres tentang Pengelolaan, Kegiatan Produksi, Penjaminan, dan Preferensi Harga Industri Pertahanan.
13. Penyusunan Rancangan Keppres tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *ASEAN Center of Military Medicine*.
14. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia.





Indikator Kinerja 3

Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Polhukam dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tugas dan fungsi ini beririsan dengan tugas dan fungsi Deputy Dukungan Kerja Kabinet yang tetap menyiapkan materi sidang yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga serta mengoordinasikan bahan yang diperoleh dari Deputy Substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator ketiga ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

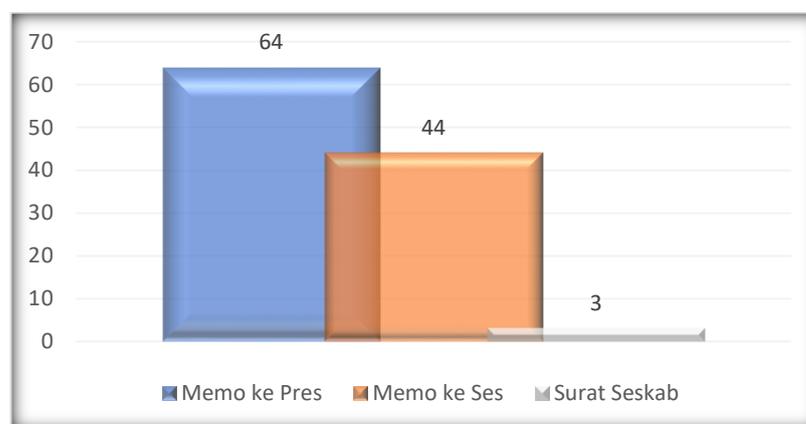
Dari 111 rekomendasi dengan sasaran indikator kinerja 3 yang dihasilkan sebanyak 64 rekomendasi atau sebesar 57,66% dalam bentuk memo diteruskan ke Presiden sedangkan 44 rekomendasi atau 39,64% disampaikan hanya sampai Sekretaris Kabinet, dan 3 rekomendasi dalam bentuk surat atau 2,70%

disampaikan ke Pimpinan KK/L., sebagaimana tampak dalam tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3.11
Capaian Output IKK 3 Deputy Bidang Polhukam Periode Jan-Sep 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
64	44	3	111

Gambar 3.9
Capaian Output IKK 3 Deputy Polhukam Jan- Sep 2020

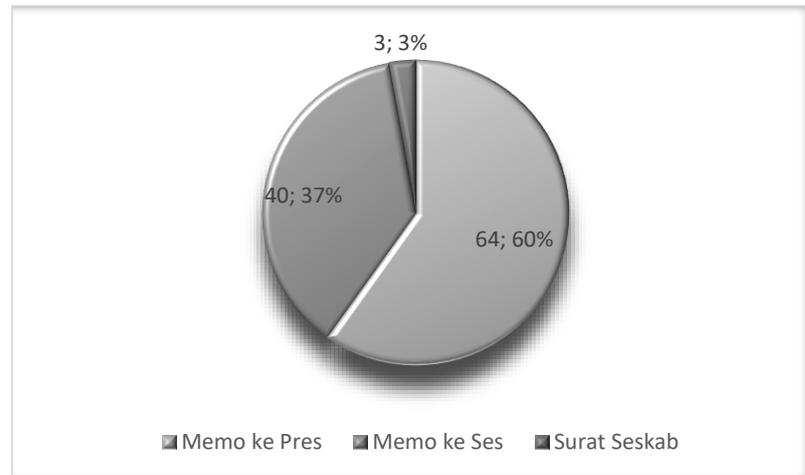


Dalam periode Januari-September 2020, Deputy Bidang Polhukam telah menyiapkan sebanyak **111** rekomendasi, dari **111** rekomendasi yang disampaikan Deputy Polhukam, telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet sebanyak **107** rekomendasi atau sebesar **96,40%**, dimana rekomendasi tersebut disampaikan sebagai materi/bahan atau referensi bagi Presiden atau Sekretaris Kabinet sendiri. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **96,40%** dengan kategori **sangat baik** atau dengan kata lain ada sekitar **4** rekomendasi yang diajukan tidak disetujui oleh Sekretaris Kabinet karena pada keempat berkas rekomendasi tersebut tidak terdapat catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet. Sebagaimana tampak dalam tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3.12
Capaian Outcome IKK 3 Deputy Bidang Polhukam Periode Jan-Sep 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
64	40	3	107

Gambar 3.10
Capaian Outcome IKK 3 Deputi Polhukam Jan- Sep 2020



Beberapa rekomendasi IKK 3 Bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dalam kurun waktu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Bahan Presiden dalam Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara.
2. Penyiapan Bahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Penyiapan Bahan Presiden atas Permohonan kepada Presiden untuk Melantik Pamong Praja Muda Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXVII Tahun 2020.
4. Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet untuk Mendampingi Presiden dalam Rapat Membahas Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Masa Pandemi Covid-19.
5. Penyampaian Arahan Presiden RI atas Partisipasi Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2020.
6. Bahan Rapat Intern tentang Rencana Pemulangan Eks ISIS Asal Indonesia.
7. Bahan Rapat Terbatas tentang Antisipasi Mudik Lebaran Tahun 2020.
8. Bahan Rapat Terbatas Keamanan Kawasan Laut China Selatan tanggal 7 Juli 2020.



RAPAT TERBATAS LANJUTAN PEMBAHASAN PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) JAKARTA - 26 FEBRUARI 2020

Arahan Presiden terkait Pemindahan IKN pada Rapat Terbatas 15 Januari 2020:

- Menetapkan kembali nama Provinsi IKN
- Memiliki visi terkait bentuk pemerintahan di IKN
- Mengikuti RUU IKN, yaitu:
 - IKN harus flexible, sehingga cukup dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota (setingkat Menteri dan dipilih langsung oleh Presiden);
 - Di IKN tidak ada DPRD;
 - Wilayah IKN merupakan wilayah administratif;
 - Penduduk tidak perlu diatur dalam RUU IKN;
 - Kantor BI, OJK dan LPS harus berlokasi di IKN;
 - TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung agar mulai melihat lokasi markas di IKN baru.

TINDAK LANJUT PERPINDAHAN IKN

Penyiapan 3 Instrumen Hukum

- RUU tentang IKN (Proses: penyiapan pelaporan oleh Kemenstrag kepada Presiden)
- RPerpres tentang Badan Otorita IKN (Proses: penyiapan paraf kepada Menku)
- RPerpres tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional Calon IKN (Proses: pembahasan tingkat K/L)

SAKSIAN

RUU IKN perlu memperhatikan: UU tentang Pemda; UU tentang Pilkada, serta UU tentang DKI Jakarta

Perlu dipikirkan bentuk pemerintahan IKN:

- Pemerintahan Daerah yang memiliki karakteristik sebagaimana Pasal 188 ayat (1) UUD 1945.
- Kawasan Khusus yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita IKN sehingga tidak terikat rezim Pemda.

SAKSIAN

Jika IKN bentuk pemerintahannya adalah Provinsi maka konsekuensinya akan dipimpin seorang Kepala Daerah (Gubernur).

Jika IKN berbentuk Kawasan Khusus, maka perlu pengaturan yang tegas mengenai pembagian urusan antara Kepala Badan Otorita IKN dengan Gubernur Kalimantan.

RAPAT TERBATAS TERKAIT DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT Jakarta, 11 Maret 2020

- Kebijakan dana otas merupakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 35 Tahun 2008
- Kebijakan dana otas (2% dari DAU Nasional) khususnya ditujukan untuk pendidikan & kesehatan dan akan berakhir pada tahun 2021
- Perubahan UU nomor 21 Tahun 2001 termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020

Permasalahan Pemantauan Dana Otas

- Implementasi kebijakan dana otas saat ini belum optimal
- Tidak ada Sarana/Rekomendasi yang terintegrasi
- Pemantauan, pengalokasian, & pertanggungjawaban dana otas belum optimal
- Kurangnya transparansi data output dan outcome penggunaan dana otas
- Kualitas SDM pengelola dana otas rendah
- Pemanfaatan dana otas tidak sesuai peruntukannya
- Adanya anggapan dana otas sebagai dana politik

Arahan Presiden (dalam Rapat Terbatas tahun 2015 & 2016):

- Dana otas yang diberikan sangat besar namun tidak sampai ke bawah
- Presiden akan mandatkan Kepala Daerah (ke dana otas tidak sampai ke rakyat)
- Pemaksimalan penggunaan Papua Insan terkait pada: alokasi anggaran, proses perencanaan yang lebih terintegrasi antar stakeholder sehingga belum efektif

Alternatif Materi Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001

Sistem Kebijakan Dana Otas:

- Alternatif 1: Besaran dana otas tetap 2% dari DAU Nasional
- Alternatif 2: Dana otas ditawarkan dengan mengintegrasikan kabupaten Papua dan kabupaten keungan negara
- Alternatif 3: Memberikan skema baru non-dana otas, misal skema DAU/DAK Reguler

Rekomendasi

- Kebijakan dana otas diharapkan dengan besaran dari DAU yang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara
- Revisi/penyempurnaan, pemantauan, pelayanan, dan pengendalian
- Sekunderisasi alternatif kebijakan Perubahan UU terkait (menurut materi tertera atau hanya terkait dana otas)

BUTIR WICARA PRESIDEN PELANCINGAN PAMONG PRAJA MUDA INSTITUT PEMERINTAHAN KOTA NEGERI (IPDN) ANGKATAN XXVII TAHUN 2020

GAMBARAN UMUM

IPDN adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Keilmuan di lingkungan Kementerian guna menyiapkan kader pemerintah pusat maupun daerah

Kampus IPDN tersebar di: Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua

Jumlah calon Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan 27 (XXVII) Tahun 2020 berjumlah 897 orang.

Calon Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Tahun 2020 telah dibekali materi Revolusi Mental (menjadi Calon Kader Pelopor Revolusi Mental)

Pada Era Revolusi Industri 4.0 saat ini, Praja Muda Lulusan IPDN diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi pemerintahan sehingga dapat mempersiapkan generasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, khususnya dalam membentengi pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Bagi para pejabat dan pengajar di Kampus IPDN agar senantiasa menjaga kondisinya dan kinerjanya dalam proses pendidikan sehingga dapat mencetak Praja Muda yang profesional, mandiri, memiliki jiwa nasionalisme serta melayani masyarakat.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: B.02N/Seskab/Polhukam/9/2020
Sifat: Segera
Lampiran: -
Hal: 1

Jakarta, 23 September 2020

Kepada Yth:
Menteri Luar Negeri

Penyampaian Arahan Presiden atas Partisipasi Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB ke-75 (SMU ke-75 PBB) Tahun 2020, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan/disposisi tertulis "persiapkan".

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dapat melakukan langkah-langkah persiapan termasuk bahan pidato Bapak Presiden pada Pertemuan SMU ke-75 PBB serta berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kehadiran pada Pertemuan Tingkat Tinggi Lainnya dalam rangka SMU ke-75 PBB.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,
Antonius Agung

Perkembangan Laut China Selatan

Klaim sepihak China atas wilayah laut di Laut China Selatan meliputi nine-dash lines, mencakup sebagian perairan Brunei, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Indonesia. PAK disahkan PBB pada 12-2-2012, menetapkan klaim PAK tidak sesuai peraturan ZEE berdasarkan UNCLOS.

Sengketa Jepang dan China yang dipicu perubahan "tata paku di Laut China Selatan" dengan penemuan vasca China Pulau Diaoyu, sementara pemerintah resmi Jepang Pulau Senkaku.

Akar Permasalahan di kawasan LCS

- 30% total luas wilayah yang diklaim China merupakan wilayah RI
- Potensi dari jalur perdagangan melalui LCS senilai USD 5,3 T per tahun (setara 1/3 total perdagangan maritim global). SDA berupa cadangan minyak bumi, gas alam dan perikanan
- Perubahan peta baru NSRI disertai perubahan nama wilayah ZEE di utara Kepulauan Laut Natuna Utara Sepanjang Des '19 s.d. Jan '20 kapal nelayan China 3x masuk perairan Natuna secara ilegal

Perkembangan Dinamika di LCS

- China telah melakukan **multiple operation** melalui **Blue Sea Campaign 2020**
- AS mengirim 3 kapal induk AS termasuk kapal induk terbaru, dan diantaranya sudah memiliki aparat di Laut Filipina
- Surevi Kapal China Haiyang DUCH di ZEE Malaysia Sengketa AS mengirim USS Carlisle Gifford

Sikap Pemerintah RI

- Peningkatan ketertarikan sipak melalui **Catatan Diplomatik RI 12-4-2020 bahwa RI di bawah UNCLOS 1982. Tidak ada negosiasi perubahan RI di LCS**
- Pertemuan virtual Menteri ASEAN 24-4-2020, RI mendukung negara ASEAN menentang klaim sepihak China, mendorong para pihak mengormati hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, serta menyelesaikan masalah melalui pengalihan arbitrase int.
- Mendukung ASEAN terus bernegosiasi dengan China melalui Code of Conduct guna menjaga kondusifitas di LCS

Rekomendasi

- Peningkatan aktivitas ekonomi di ZEE secara massif, sistemik dan terkoordinasi melalui eksplorasi SDA dan pengembangan relayan.
- Membangun alik-gener dengan peningkatan kehadiran sekutan 3 mitra TNI berinsinyur dengan stakeholders di wilayah Laut Natuna Utara, disertai patroli dibawah satu komando kendali Pangkajeneberian I
- Peningkatan intensitas diplomasi memanfaatkan forum ASEAN serta posisi RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB
- Peningkatan intensitas diplomasi memanfaatkan forum ASEAN serta posisi RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB
- Memeratkan ASEAN Outlook on The Indo-Pacific Juni 2019 sebagai media diplomasi strategi ASEAN kepada negara mitra guna meyakinkan China untuk menghentikan aksi sepihaknya

RAPAT TERBATAS TENTANG ANTISIPASI MUDIK LEBARAN TAHUN 2020

Dasar Hukum

- UU No. 25/2000 tentang Kepolitan Negara (Ps. 3)
- UU No. 32/2004 tentang Peraturan Negara (Ps. 7, ayat 1) dan Ps. 10, ayat 1)
- UU No. 6/2018 tentang Pelaksanaan Kesehatan (Ps. 3)

Jumlah Mudik

- Cendrung meningkat setiap tahun, mencapai 20 juta per tahun
- Perkiraan berdasarkan penghitungan kasar pemerintah dari tahun 2019 Mei 2020

Melanda 170 Negara

- Melalui Comment 1 (Khan-Oxford Covid Research Unit (COCKUP) Mengetahui 10 April 2020) baru, positif sekitar April 71.000 kasus.
- Model Richard's Curve Persebaran Meluasnya dan Simulasi (PMM) IIR: akhir Mei 2020 kasus

Implikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional:

- Velocity of money
- peningkatan kualitas infrastruktur
- peningkatan konsumsi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi.

REKOMENDASI

- Jika masih terdapat tren peningkatan jumlah kasus COVID-19 maka pemerintah harus secara tegas melarang warga untuk mudik ke kampung halaman karena dapat memicu penyebaran pandemi dari kota ke daerah.
- Larangan mudik dapat dibebat apabila kurva statistik kasus COVID-19 telah menunjukkan tren landai (tidak terjadi peningkatan kasus baru).



Periode Oktober – Desember 2020

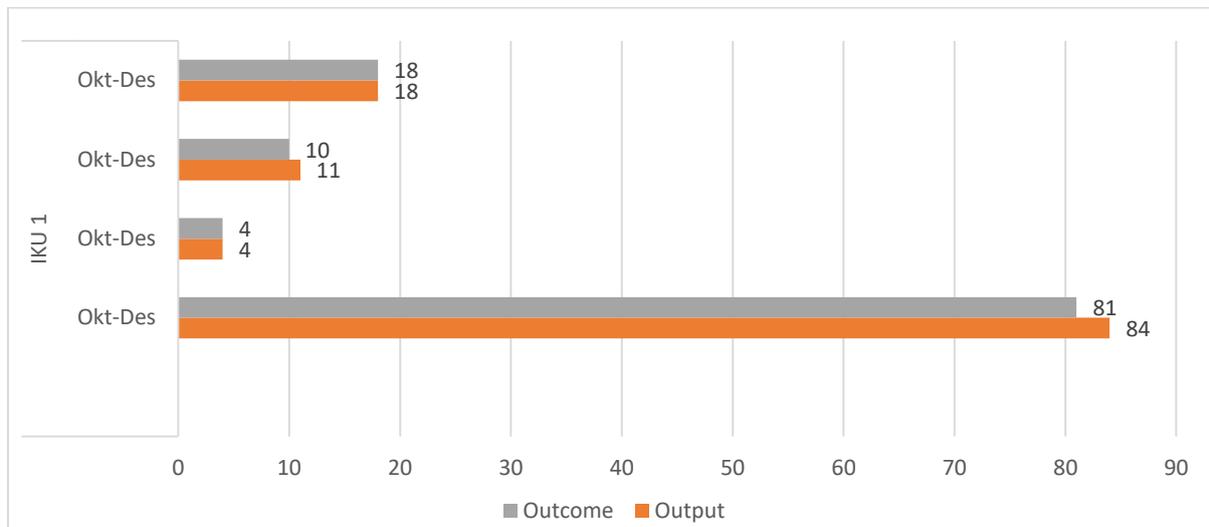
Pada periode Oktober-Desember 2020, Deputi Polhukam menjalankan tugas dan fungsi baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahu 2020, periode tersebut menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet terkait dengan penyusunan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Polhukam dan analisis atas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas berupa rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Polhukam.

Secara garis besar **capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam** dalam mencapai Sasaran Strategis Periode Oktober - Desember 2020 ini adalah sebesar **96,59%** atau tergolong dalam kategori **sangat baik** (karena capaian sasaran sebesar 97,59% berada pada rentang 85% - 100%).

Tabel 3.13
Capaian Rekomendasi
Periode Oktober - Desember 2020

Rekomendasi	Output	Outcome	% CAPAIAN
1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah	84	81	96,42%
2. Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan yang disetujui Presiden	4	4	100%
3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	11	10	90,91%
4. Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	18	18	100%
Total	117	113	96,58%

Gambar 3.11
Capaian Output dan Outcome Deputy Polhukam
Periode Oktober - Desember 2020



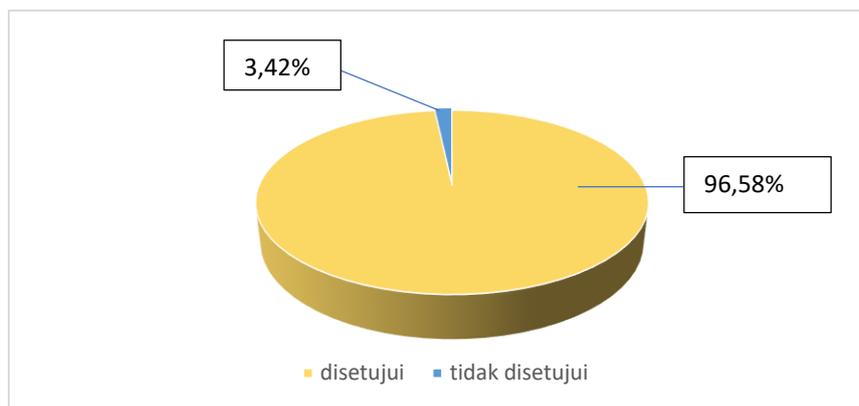
Uraian mengenai capaian indikator sasaran, yaitu capaian kinerja Deputy Bidang Polhukam dari mulai Oktober sampai dengan Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14
Capaian Indikator Sasaran
Periode Oktober - Desember 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	96,42%	106,67%
2.	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,11%
3.	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	90,91%	101,01%
4.	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,11%

Dari keempat indikator sasaran di atas, persentase realisasi output yang dicapai Deputy Bidang Polhukam periode Oktober – Desember 2020 didapat total realisasi capaian sebesar **96,58% telah disetujui** Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan diteruskan kepada Pimpinan Kementerian/ Lembaga untuk ditindaklanjuti, serta diberikan catatan/arahan/disposisi kepada Deputy untuk ditindaklanjuti) dan **3,42% tidak disetujui** oleh Sekretaris yakni atas rekomendasi tersebut Sekretaris Kabinet tidak memberikan catatan/arahan/ disposisi (berkas turun tanpa ada catatan Sekretaris Kabinet), sehingga tidak diketahui secara pasti apakah terhadap rekomendasi tersebut disetujui atau tidak oleh Sekretaris kabinet.

Gambar 3.12
Capaian Deputy Polhukam
Periode Oktober - Desember 2020



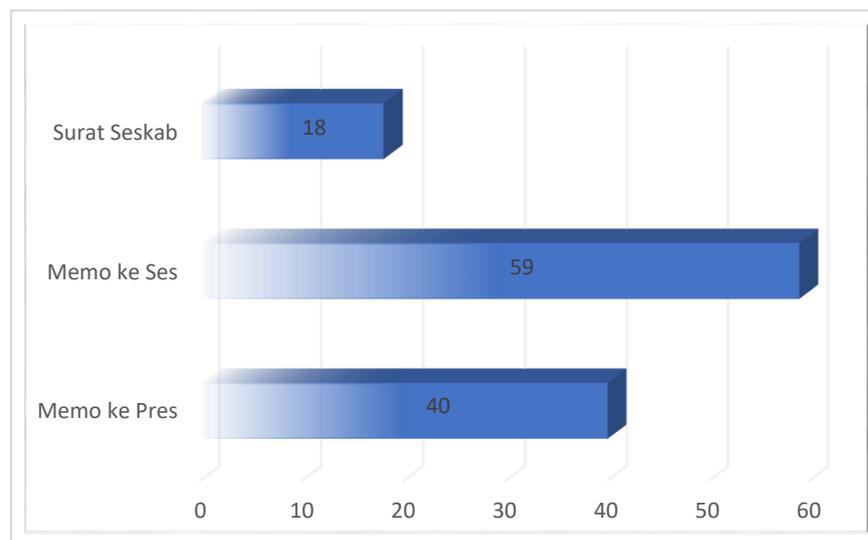
Pada periode Oktober - Desember 2020, Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah menghasilkan output sebanyak 117 rekomendasi. Dari 117 rekomendasi yang dihasilkan tersebut sebanyak **113 rekomendasi disetujui** oleh Sekretaris Kabinet (96,58%) dan ada **4 rekomendasi tidak disetujui** oleh Sekretaris Kabinet (3,42%), rekomendasi yang tidak disetujui tersebut merupakan rekomendasi yang tidak terdapat catatan/disposisi/petunjuk Sekretaris Kabinet pada berkas dimaksud sehingga tidak diketahui apakah rekomendasi tersebut apakah benar-benar telah digunakan oleh Sekretaris Kabinet atau tidak.

Capaian Output dan Outcome Deputy Bidang Polhukam periode Oktober – Desember 2020 sebagaimana terlihat dalam Tabel dan Gambar berikut ini.

Tabel 3.15
Capaian Output Deputi Bidang Polhukam Periode Okt-Des 2020

	Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
Total	40	59	18	117

Gambar 3.13
Capaian Output Deputi Polhukam
Periode Oktober - Desember 2020



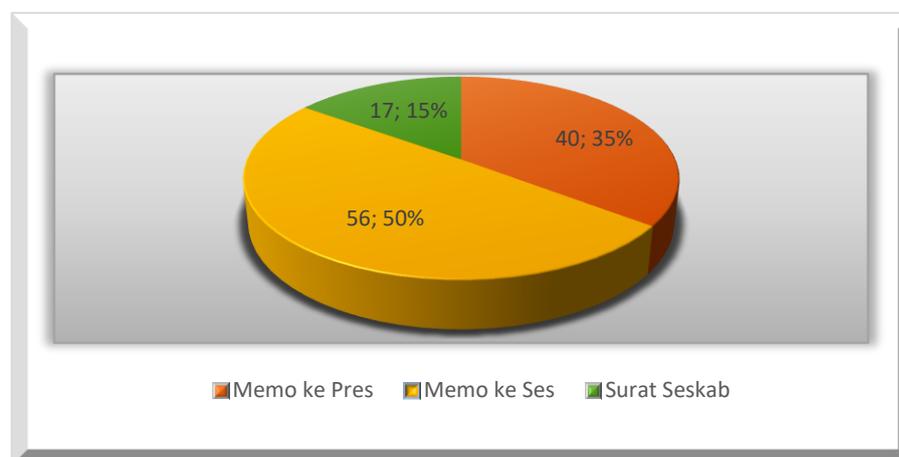
Tabel 3.16
Capaian Outcome Deputi Bidang Polhukam Periode Okt-Des 2020

	Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
Total	40	56	17	113

Sebagaimana terlihat dari Tabel 3.16 di atas, dari **113 rekomendasi** yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet terdiri dari **96 rekomendasi berupa memo** (84,96%) dan **17 rekomendasi berupa surat** Sekretaris Kabinet yang diteruskan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/Publik (15,04%). Dari **113 rekomendasi** berupa memo terdapat **40 rekomendasi** atau sebesar 35,40% rekomendasi tersebut **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet **untuk disampaikan**

kepada Presiden dan **56 rekomendasi** atau sebesar 49,56% **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet untuk **tidak disampaikan** kepada Presiden, namun oleh Sekretaris Kabinet rekomendasi tersebut diberikan catatan/arahan/disposisi untuk ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam. Selain itu terdapat 4 rekomendasi (3 rekomendasi berupa memo dan 1 rekomendasi berupa surat) yang tidak mendapatkan arahan/catatan/disposisi Sekretaris Kabinet pada berkas tersebut sehingga dikategorikan **tidak disetujui**.

Gambar 3.14
Capaian Outcome Deputy Polhukam Okt-Des 2020



Indikator Kinerja 1

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis dan rekomendasi tersebut disetujui serta dapat dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet, Presiden, dan Pimpinan Kementerian/Lembaga. Ukuran ketepatan rekomendasi yang berkualitas dapat dilihat berdasarkan presentase rekomendasi yang disampaikan kepada *stake holders* maupun kepada Sekretaris Kabinet sendiri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama mencapai **96,42% (Sangat Baik)** dari keseluruhan jumlah rekomendasi

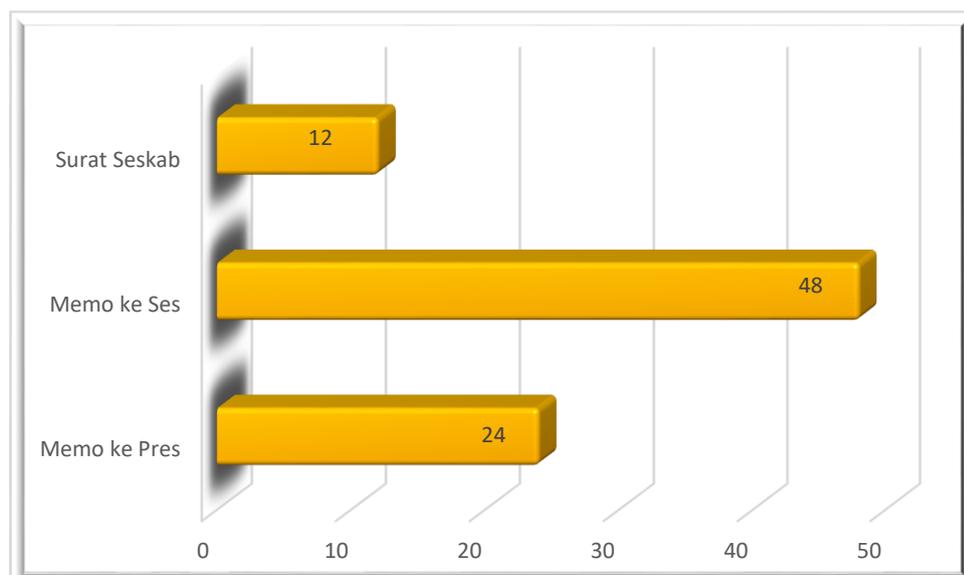
atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) yang disampaikan dan kemudian disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal tersebut terlihat bahwa dari **84 rekomendasi** atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, sebanyak **81 rekomendasi disetujui** oleh Sekretaris Kabinet untuk diteruskan/disampaikan kepada Presiden dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta **disetujui** untuk tidak perlu diteruskan/disampaikan, namun atas rekomendasi tersebut Deputy Bidang Polhukam perlu menindaklanjutinya sesuai arahan/catatan/disposisi Sekretaris Kabinet.

Capaian tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

Tabel 3.17
Capaian Output IKK I Deputy Bidang Polhukam
Periode Oktober-Desember 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
24	48	12	84

Gambar 3.15
Capaian Output IKK 1 Deputy Polhukam Okt-Des 2020





Rekomendasi yang disetujui disini telah memenuhi kriteria:

1. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan atau bahan alternatif yang dapat dipakai Presiden untuk memutuskan suatu kebijakan atau hanya untuk dibaca/diketahui Presiden sebagai referensi dan/atau *second opinion*.
2. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi terkait untuk diketahui sebagai referensi atau ditindaklanjuti sesuai kewenangannya (baik berupa surat maupun memorandum Sekretaris Kabinet).
3. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam mengambil suatu kebijakan/keputusan atau dijadikan sebagai bahan referensi dalam pertemuan dengan Presiden atau instansi terkait atau audiensi dari utusan Negara sahabat, organisasi kemasyarakatan atau publik lainnya.
4. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam disetujui untuk tidak diteruskan kepada Presiden, Menteri atau Pimpinan Lembaga atau Kepala Daerah, terhadap rekomendasi tersebut Sekretaris Kabinet memberikan arahan/ catatan/disposisi kepada Deputi Bidang Polhukam untuk menindaklanjutinya.

Di periode Oktober-Desember 2020 terdapat 3 rekomendasi bidang polhukam (3,57%) yang tidak mendapat respon Sekretaris Kabinet, terhadap ketiga rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, namun turun tanpa ada catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet, sehingga dikategorikan tidak disetujui.

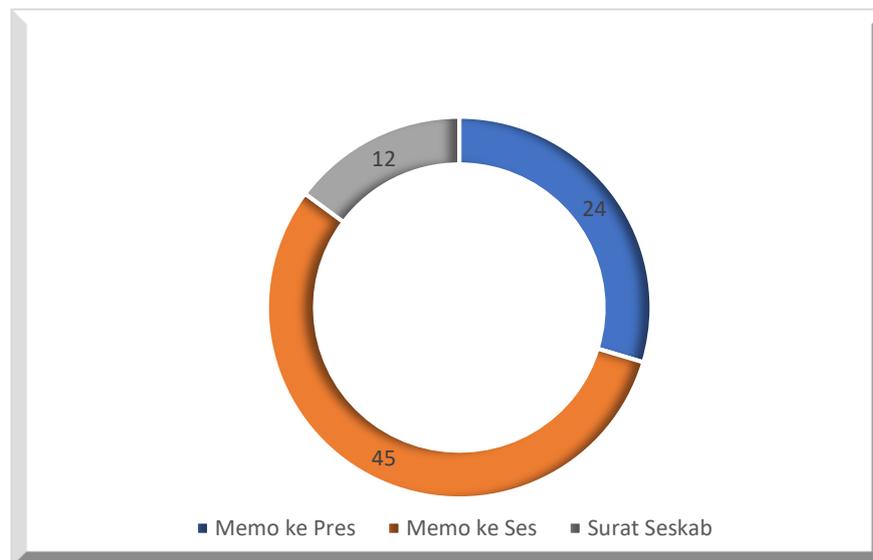
Dari 81 rekomendasi capaian sasaran indikator kinerja tersebut yang dihasilkan pada periode ini sebanyak 24 memo rekomendasi atau sebesar 29,63% diteruskan ke Presiden sedangkan 45 memo rekomendasi atau 55,56 % hanya ditujukan kepada Sekretaris Kabinet serta 12 rekomendasi berupa surat atau

14,81% disampaikan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel berikut ini.

Tabel 3.18
Capaian Outcome IKK 1 Deputi Polhukam
Periode Oktober-Desember 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
24	45	12	81

Gambar 3.16
Capaian Outcome IKK 1 Deputi Polhukam
Periode Oktober-Desember 2020



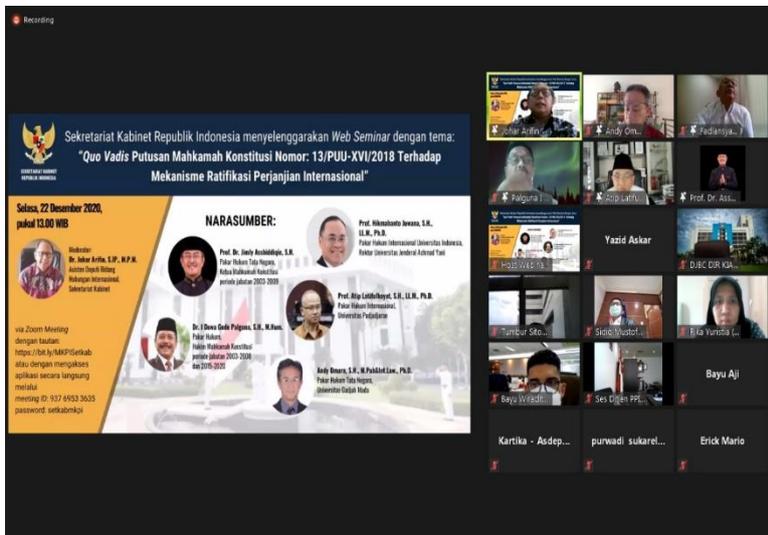
Beberapa rekomendasi IKK 1 Bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Isu-isu krusial bernilai strategis:

1. Penyampaian Rekomendasi Mengenai “Antisipasi Konflik Sosial sebagai Dampak Pemilihan Kepala Daerah Serentak guna Membangun Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI”.
2. Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia untuk Diterbitkan Kebijakan Penyaluran Biaya Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.



4. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.
5. Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet dalam Mendampingi Presiden Menerima Para Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat dan Penanganan Peristiwa Talangsari.
7. Usulan Penyelenggaraan Rapat Intern tentang Penyederhanaan Birokrasi dan Pembubaran 10 LNS
8. Pelaksanaan Web Seminar: Quo Vadis Putusan Mahkamah Konsituti Nomor: 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Mekanisme Ratifikasi Perjanjian Internasional.
9. Saran Menhan Mengenai Kerja Sama RI-Korsel Bidang Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X





Indikator Kinerja 2

Persentase rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Dalam periode Oktober-Desember 2020, Deputi Bidang Polhukam telah menghasilkan rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga bidang Polhukam yang **disampaikan** kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **4 rekomendasi**, dari **4 rekomendasi** yang diajukan sebanyak **4 rekomendasi** atau (100%) seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi persetujuan ini berupa memo kepada Presiden dan surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang berisi persetujuan kepada Menteri/Pimpinan untuk melanjutkan penyusunan suatu rancangan peraturan atau memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden untuk menyampaikan persetujuan Presiden terhadap usulan rancangan peraturan tersebut.

Selain hal tersebut di atas, rekomendasi tersebut dapat berupa memorandum laporan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet berupa masukan yang diberikan dalam suatu rapat pembahasan rancangan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi terkait maupun yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet. Selain itu dapat juga berupa naskah surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang berisi catatan atas permohonan penyusunan suatu rancangan agar dikaji kembali atau dirumuskan ulang agar tidak terjadi tumpang tindih, multi tafsir atau bertentangan dengan PUU lainnya serta memenuhi kriteria peraturan yang harus memerlukan persetujuan Presiden.

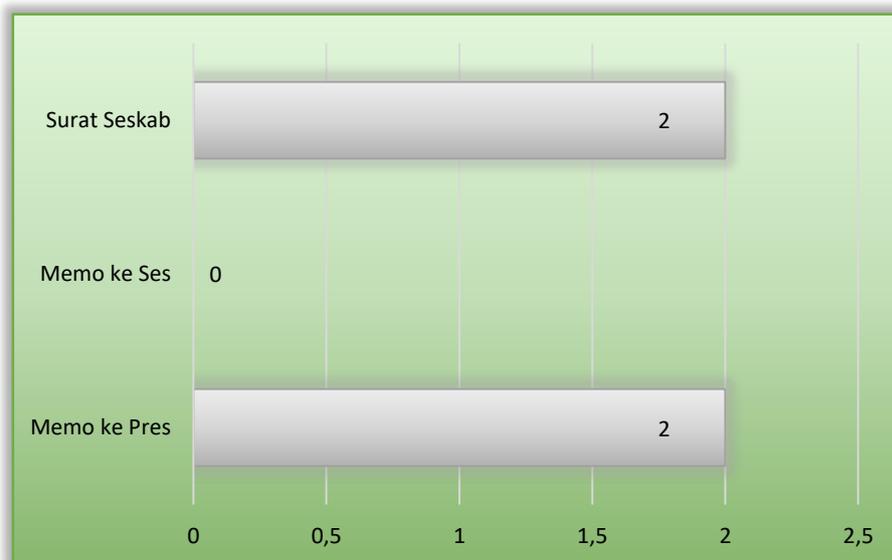
Dari 4 rekomendasi sasaran indikator kinerja 2 yang dihasilkan pada tahun 2020 sebanyak 2 rekomendasi (memo) atau sebesar 50% diteruskan ke Presiden,

2 rekomendasi atau 50% berupa surat Sekretaris Kabinet kepada Pimpinan K/L. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3.19
Capaian Output IKK 2 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt-Des 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
2	0	2	4

Gambar 3.17
Capaian Output IKK 2 Deputi Polhukam Okt-Des 2020

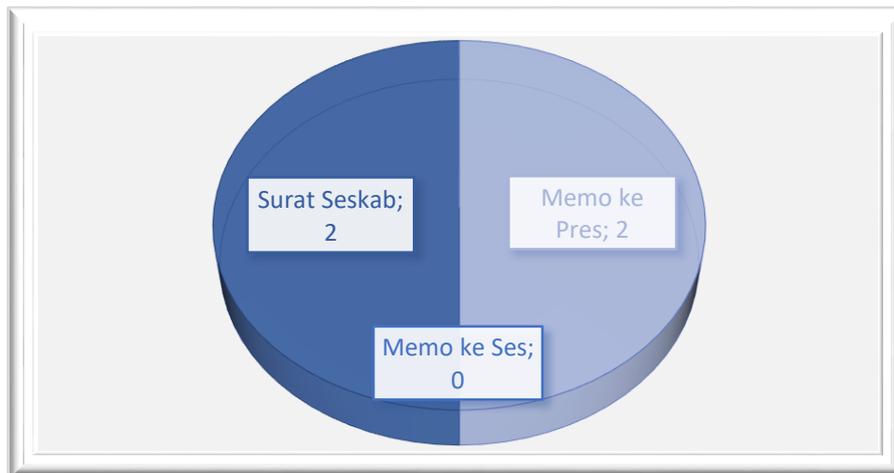


Dalam kurun waktu Oktober-Desember 2020, Deputi Bidang Polhukam untuk capaian IKK 2 telah menghasilkan 4 rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dari 4 rekomendasi yang diajukan atau capaian sebesar 100%, sebagaimana tergambar dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.20
Capaian Outcome IKK 2 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt-Des 2020

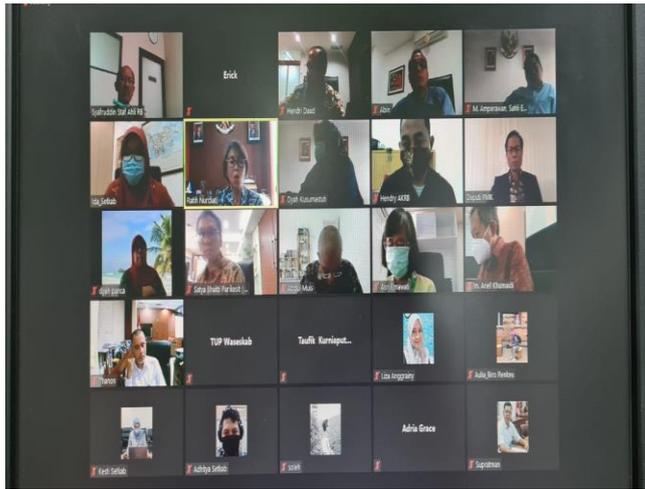
Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
2	0	2	4

Gambar 3.18
Capaian Outcome IKK 2 Deputi Polhukam Okt-Des 2020



Beberapa rekomendasi IKK 2 Bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Tata Cara Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden.
2. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Noor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.
3. Surat Seskab tentang Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
4. Permohonan Persetujuan Presiden atas RPermenkominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Desember 2020

Nomor : B.0319 /Sekab/ Polhukam/ 12 /2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional

Kepada Yth.
Menteri Luar Negeri
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Luar Negeri Nomor 441/Th/112020/07/01 tanggal 3 November 2020 kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, bersama ini kami Menteri menjadi Peraturan Menteri, dengan ketentuan dapat diteliti untuk segera ditetapkan sampai dengan Rancangan Peraturan Menteri tersebut dapat diteliti untuk segera ditetapkan Menteri Luar Negeri sebagaimana hasil kesepakatan pada rapat pembahasan tanggal 24 November 2020. Adapun perubahan-perubahan dimaksud bertujuan untuk membesarkan pemerintahan di bidang luar negeri, yaitu pada pengaturan mengenai Laporan Pemantauan Keanggotaan Indonesia, Penghentian Keanggotaan Indonesia, dan Tata Kerja Kelompok Kerja.

Kiranya Menteri dapat menindaklanjuti hal tersebut dalam waktu tidak terlalu lama dan melaporkan kembali perkembangan pendataan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.

Demikian, untuk menjadi perhatian Menteri.

Sekretaris Kabinet
[Signature]

Tembusan Yth.
1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara; dan
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Indikator Kinerja 3

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Polhukam dalam melaksanakan tugas dan fungsi baru dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 untuk memberikan rekomendasi terkait penyelesaian masalah yang mengalami hambatan.

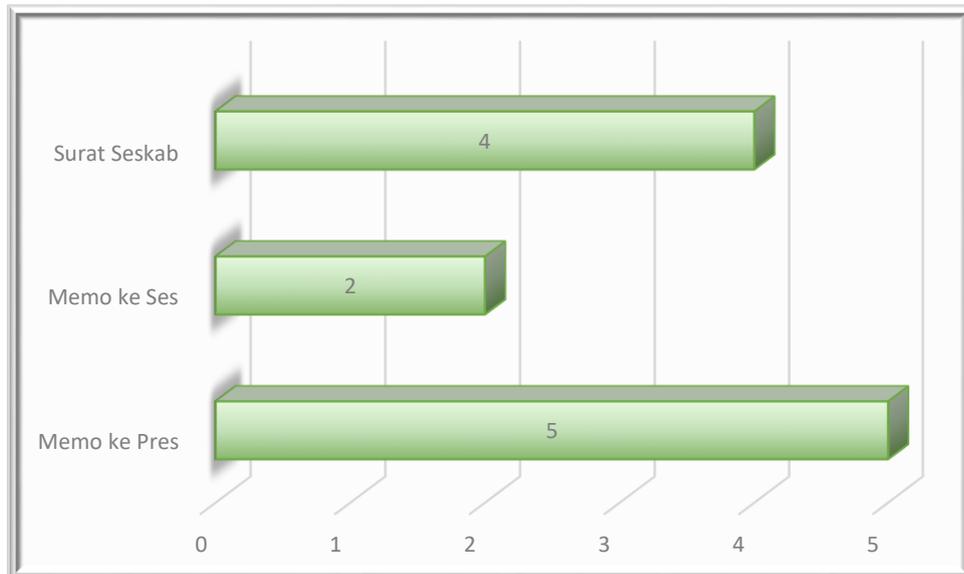
Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator ketiga ini diantaranya berupa memo rekomendasi kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dibahas dalam rapat atau sidang kabinet, mendapatkan arahan/persetujuan Presiden untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang, surat Sekretaris Kabinet kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk ditindaklanjuti, dan memo rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet guna mendapatkan arahan untuk ditindaklanjuti.

Dari 11 rekomendasi dengan sasaran indikator kinerja 3 yang dihasilkan sebanyak 5 rekomendasi atau sebesar 45,45% dalam bentuk memo diteruskan ke Presiden sedangkan 2 rekomendasi atau 18,18% disampaikan hanya sampai Sekretaris Kabinet, dan 4 rekomendasi dalam bentuk surat atau 36,36% disampaikan ke Pimpinan KK/L, sebagaimana tampak dalam tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3.21
Capaian Output IKK 3 Deputy Bidang Polhukam Periode Okt-Des 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
5	2	4	11

Gambar 3.19
Capaian Output IKK 3 Deputi Polhukam Okt-Des 2020

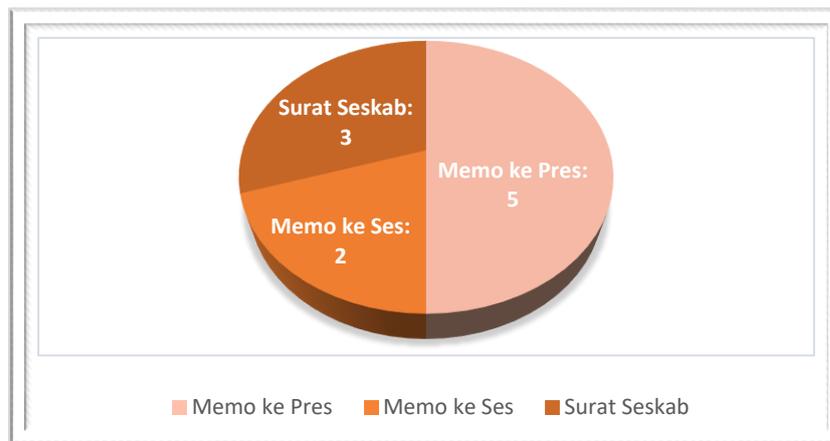


Dalam periode Oktober-Desember 2020, Deputi Bidang Polhukam telah menyiapkan sebanyak **11** rekomendasi, dari **11** rekomendasi yang disampaikan Deputi Polhukam, telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet sebanyak **10** rekomendasi atau sebesar **90,91% disetujui**, dimana rekomendasi tersebut disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk mendapatkan persetujuan. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **90,91%** dengan kategori **sangat baik** atau dengan kata lain ada sekitar 1 rekomendasi atau 9,09% yang diajukan **tidak disetujui** oleh Sekretaris Kabinet karena pada berkas rekomendasi tersebut tidak terdapat catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet. Sebagaimana tampak dalam tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3.22
Capaian Outcome IKK 3 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt-Des 2020

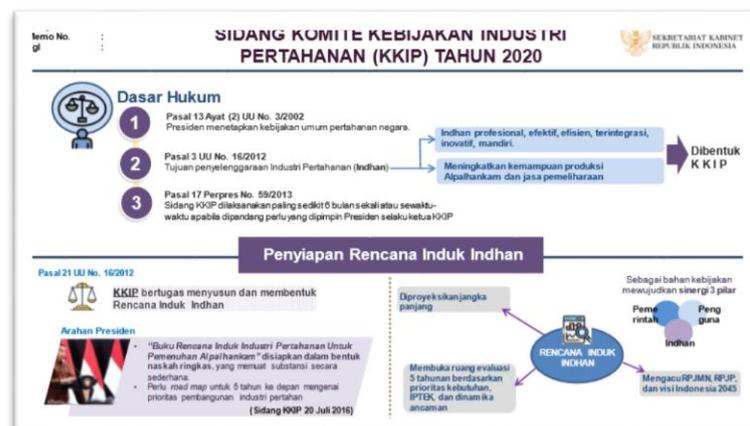
Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
5	2	3	10

Gambar 3.20
Capaian Outcome IKK 3 Deputi Polhukam Okt-Des 2020



Beberapa rekomendasi IKK 3 Bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dalam kurun waktu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pelanggaran Hukum dan Diskriminasi Kebijakan Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kebijakan Terkait Pemotongan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun 2019.
3. Penanganan Permasalahan *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan.
4. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Pembiayaan Pengobatan Pegawai LAPAN.
6. Pemberian Uang Penghargaan bagi Wakil Menteri.
7. Pelaksanaan *Focus Group Discussion*: Penyusunan Kajian Tentang Penguatan Perwakilan RI dalam rangka Peningkatan Diplomasi untuk Mencapai Kepentingan Nasional.
8. Permohonan Pelaksanaan Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Tahun 2020.





Indikator Kinerja 4

Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Polhukam dalam melaksanakan tugas dan fungsi baru dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 untuk memberikan rekomendasi terkait pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah melalui pemantauan dan evaluasi.

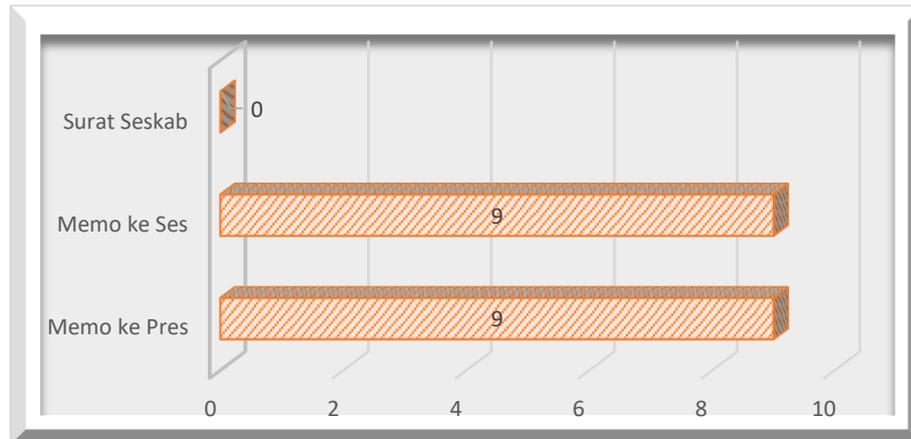
Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator keempat ini diantaranya berupa memo rekomendasi kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dibahas dalam rapat atau sidang kabinet, mendapatkan arahan/persetujuan Presiden untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang, surat Sekretaris Kabinet kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk ditindaklanjuti, dan memo rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet guna mendapatkan arahan untuk ditindaklanjuti.

Dari 18 rekomendasi dengan sasaran indikator kinerja 4 yang dihasilkan sebanyak 9 rekomendasi atau sebesar 50% dalam bentuk memo **disetujui** untuk diteruskan ke Presiden sedangkan 9 rekomendasi atau 50% **disetujui** untuk tidak diteruskan kepada Presiden, namun terdapat arahan/catatan/disposisi untuk ditindaklanjuti, sebagaimana tampak dalam tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3.23
Capaian Output IKK 4 Deputy Bidang Polhukam Periode Okt-Des 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
9	9	0	18

Gambar 3.21
Capaian Output IKK 4 Deputi Polhukam Okt-Des 2020

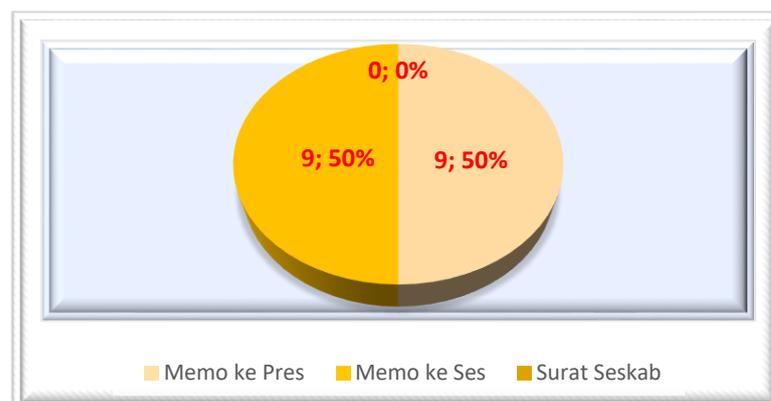


Dalam periode Oktober-Desember 2020, Deputi Bidang Polhukam telah menyiapkan sebanyak **18** rekomendasi, dari **18** rekomendasi yang disampaikan Deputi Polhukam, telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet sebanyak **18** rekomendasi atau sebesar **100%**, dimana rekomendasi tersebut disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk mendapatkan persetujuan. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **100%** dengan kategori **sangat baik**. Sebagaimana tampak dalam tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3.24
Capaian Outcome IKK 4 Deputi Bidang Polhukam Periode Okt-Des 2020

Memo ke Pres	Memo ke Ses	Surat Seskab	Jumlah
9	9	0	18

Gambar 3.22
Capaian Outcome IKK 4 Deputi Polhukam Okt-Des 2020





Beberapa rekomendasi IKK 4 Bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dalam kurun waktu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

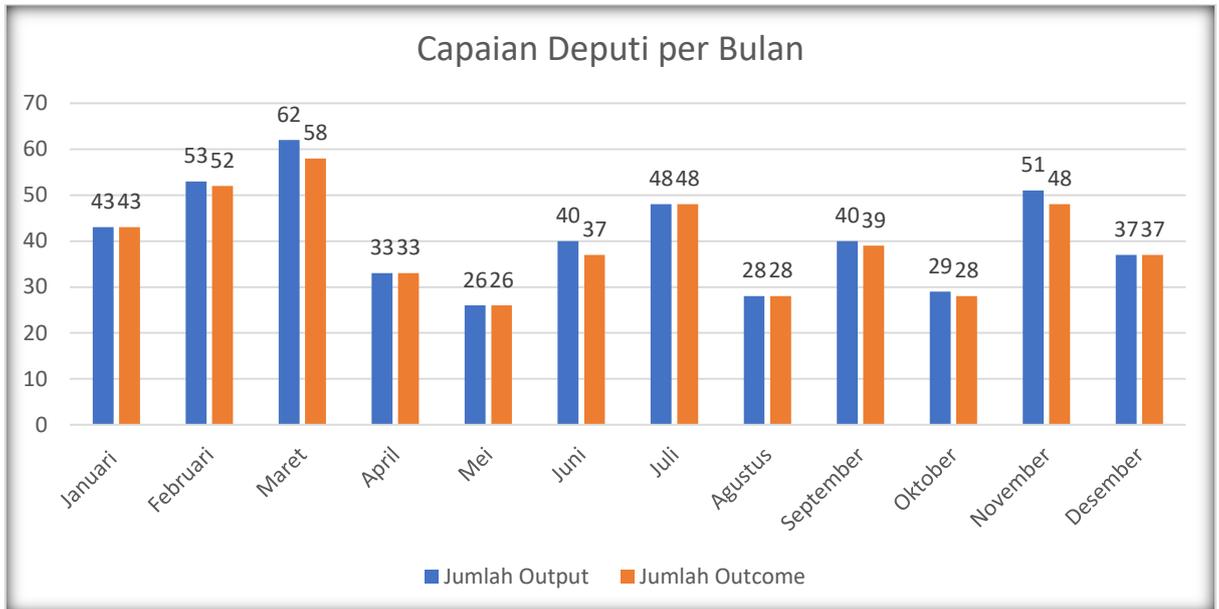
1. Perkembangan Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 serta Alokasi Anggaran dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021.
2. Pemantauan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19.
3. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
4. Penyampaian Laporan Kinerja dari Kementerian/Lembaga.
5. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
6. Laporan Kegiatan Menhan dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja Menhan ke Luar Negeri.

Dari penjelasan di atas, maka realisasi kinerja Deputy Bidang Polhukam selama tahun 2020 (selama 2 periode dengan IKK yang terjadi perubahan) adalah perbandingan keseluruhan rekomendasi yang disampaikan (*output*) sebanyak 490 dengan capaian rekomendasi yang disetujui (*outcome*) sebanyak **477 rekomendasi** yang **disetujui** sehingga persentase capaian sebesar **97,35%** dan terdapat **13 rekomendasi** yang **tidak disetujui** atau sebesar **2,65%** karena terhadap rekomendasi tersebut tidak terdapat catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Deputy Bidang Polhukam selama tahun 2020 sebagai berikut.

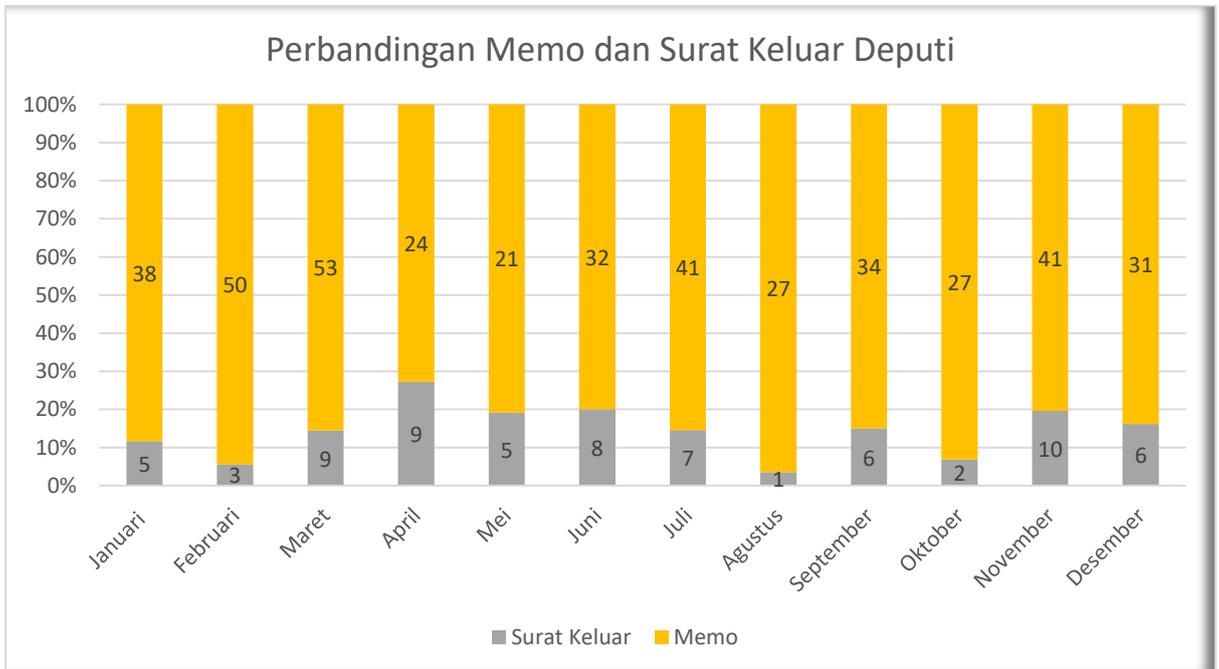
Tabel 3.25
Capaian Output dan Outcome Deputy Bidang Polhukam Tahun 2020

Bulan	Output	Outcome	Surat Seskab	Memo Seskab
Januari	43	43	5	38
Februari	53	52	3	50
Maret	62	58	9	53
April	33	33	9	24
Mei	26	26	5	21
Juni	40	37	8	32
Juli	48	48	7	41
Agustus	28	28	1	27
September	40	39	6	34
Oktober	29	28	2	27
November	51	48	10	41
Desember	37	37	6	31
Total	490	477	71	419

Gambar 3.23
Capaian Output dan Outcome Deputy Bidang Polhukam Tahun 2020



Gambar 3.24
Perbandingan Memo dan Surat Deputy Bidang Polhukam Tahun 2020





Tabel 3.26
Ikhtisar Capaian Sasaran Deputi Bidang Polhukam Periode Jan-Sep 2020

SASARAN	TARGET			REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	OUTPUT	OUTCOME	%	OUTPUT	OUTCOME	%	OUTPUT	OUTCOME
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	373 Rek	373 Rek	100%	373 Rek	364 Rek	97,59%	100% (373 Rek)	97,59% (364 Rek)

*Rek : Rekomendasi

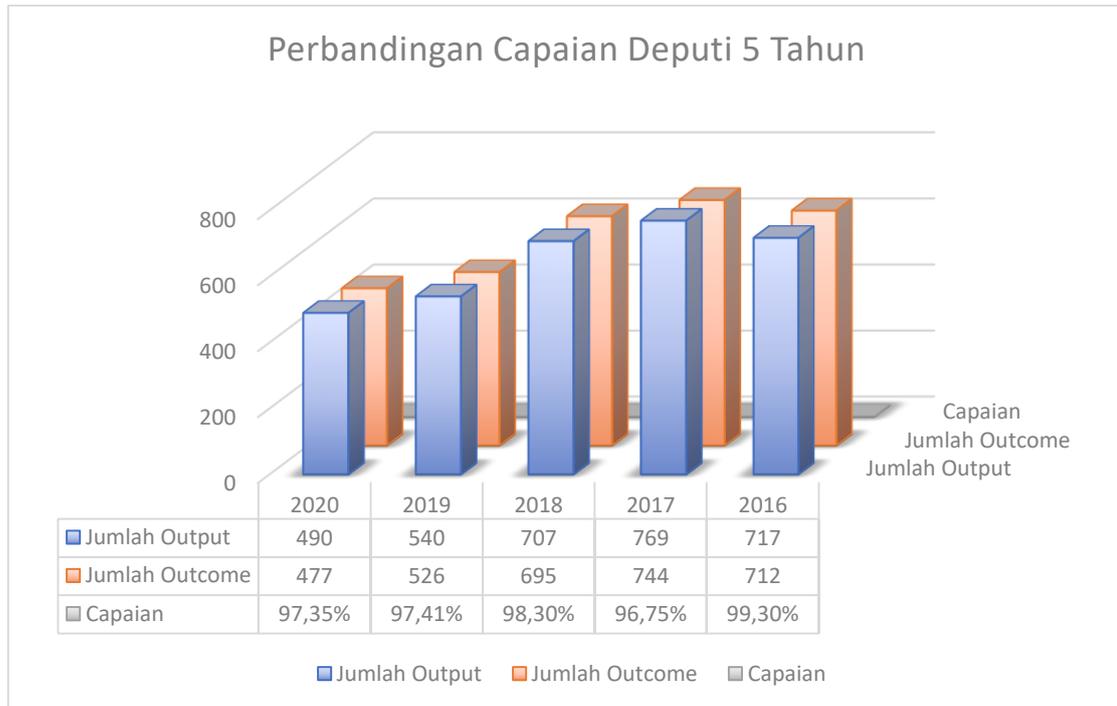
Tabel 3.27
Ikhtisar Capaian Sasaran Deputi Bidang Polhukam Periode Okt-Des 2020

SASARAN	TARGET			REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	OUTPUT	OUTCOME	%	OUTPUT	OUTCOME	%	OUTPUT	OUTCOME
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	117 Rek	105 Rek	90%	117 Rek	114 Rek	96,58%	100% (117 Rek)	108,58% (114 Rek)

*Rek : Rekomendasi

Sebagai gambaran perbandingan capaian Deputy Bidang Polhukam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 s.d. 2020) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.25
Perbandingan Capaian Output dan Outcome
Deputy Bidang Polhukam Tahun 2016 s.d. 2020



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Tahun 2016 capaian Deputy Bidang Polhukam mencapai tertinggi sebesar 99,30% yakni dari 717 rekomendasi yang disampaikan ada 712 rekomendasi yang disetujui oleh Seskab dan 5 rekomendasi tidak disetujui oleh Seskab.

Sedangkan di Tahun 2017 capaian Deputy Bidang Polhukam mengalami penurunan menjadi sebesar 96,75% yakni dari 769 rekomendasi yang disampaikan ada 744 rekomendasi disetujui oleh Seskab dan 25 rekomendasi tidak disetujui oleh Seskab.

Dari sisi jumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam kurun 5 tahun tersebut dapat terlihat bahwa Tahun 2020 mengalami penurunan jumlah rekomendasi yang disampaikan yakni sebesar 490 rekomendasi dengan 477 rekomendasi disetujui oleh Seskab.

Penurunan jumlah rekomendasi yang disampaikan tersebut seiring dengan kondisi tahun 2020 yang mengalami pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi pola kerja dan serapan anggaran yang ada.



Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Deputi Bidang Polhukam memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena dapat memenuhi capaian target yang ditetapkan di tahun 2020 (dari 490 rekomendasi yang dihasilkan, 477 rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan terdapat 13 rekomendasi masuk kategori tidak disetujui). Ke-13 rekomendasi yang tidak disetujui tersebut terdapat pada periode Januari-September 2020 terdapat 9 rekomendasi tersebut (4 rekomendasi IKK 1, 1 rekomendasi IKK 2, dan 4 rekomendasi IKK 3) dan pada periode Oktober-Desember 2020 terdapat 4 rekomendasi (3 rekomendasi IKK 1 dan 1 rekomendasi IKK3) dimana ke-13 rekomendasi tersebut tidak mendapat catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet sehingga dikategorikan **tidak disetujui**.

Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program pemerintah;
- b. Munculnya isu-isu penting bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi;
- c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. Penajaman fungsi baru Sekretariat Kabinet di tahun 2020 yakni penanganan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga dan penyelesaian masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah telah



menjadikan Sekretariat Kabinet menjadi organisasi yang strategis posisinya dalam pengelolaan manajemen kabinet.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Polhukam pada Tahun 2020 dapat dikategorikan **sangat baik (97,35%,)** namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala baik internal maupun eksternal yakni diantaranya:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyiapan bahan sidang kabinet atau rapat terbatas, sehingga memerlukan inovasi tersendiri bagi pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam untuk mendapatkan bahan tersebut, sehingga cenderung bahan yang disampaikan dapat dijadikan sebagai *second opinion* bagi Presiden dalam memberikan arahan dalam sidang atau rapat tersebut.
- b. Sistem aplikasi berbasis IT yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyusun rekomendasi perlu dibangun dan terintegrasi sehingga lebih memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas, mengingat waktu penyelesaian sangat menjadi prioritas Presiden.
- c. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas;
- d. Perlu adanya mekanisme baku dalam pencatatan setiap berkas yang naik ke Sekretaris Kabinet pada saat dikembalikan ke Unit Pengolah harus dipastikan terdapat arahan/catatan/disposisi dari Sekretaris Kabinet ataupun dari TU agar dapat dipastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan telah diterima oleh Sekretaris Kabinet, agar dapat dipastikan bahwa rekomendasi tersebut benar-benar disetujui atau tidak oleh Sekretaris Kabinet; dan
- e. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.



- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang diperlukan oleh Deputi Bidang Polhukam, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.
- d. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait menjalin *networking* seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.
- e. Pegawai yang bertugas di TU Sekretaris Kabinet harus memastikan bahwa berkas yang disampaikan benar-benar telah diterima dan mendapatkan catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Deputi Bidang Polhukam menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan.

B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Deputi Bidang Polhukam menjalankan tugas dan fungsinya di periode Januari-September 2020 melalui kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan



perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Dan di periode Oktober-Desember 2020 terdapat penajaman fungsi Sekretariat Kabinet khususnya di bidang substansi (dukungan analisis berupa rekomendasi) yakni pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden, Sekretaris Kabinet dan Pimpinan Kementerian/ Lembaga serta publik. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara



top down ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Secara umum seluruh Rekomendasi (IKK 1, IKK 2, dan IKK 3) yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet pada Periode Januari-September Tahun 2020 dan rekomendasi (IKK 1, IKK 2, IKK 3, dan IKK 4) pada periode Oktober-Desember 2020 yang berasal dari surat/berkas bidang Polhukam usulan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga kepada Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet yang dikemudian ditelaah/dipelajari/dianalisis sehingga menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan. Selain dari surat/berkas masuk, penyusunan rekomendasi juga didasarkan pada penugasan dari Sekretaris Kabinet atau inisiatif yang diambil dari hasil rapat terbatas, sidang kabinet, maupun dari media elektronik terkait isu strategis bidang Polhukam yang perlu dikaji melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan guna menghasilkan suatu rekomendasi.



Setiap tahunnya jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet mengalami *fluktuasi (pasang surut)* mengikuti trend kebijakan program prioritas atau program strategis Presiden di tahun tersebut (RPJMN dan RKP Tahunan) dan jumlah rekomendasi yang disampaikan sangat bergantung pada *trend* kebijakan tersebut sehingga untuk output rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet tidak bisa tetap (bisa naik atau turun) setiap tahunnya terlebih lagi di tahun 2020 ini sedang menghadapi pandemi penyebaran virus Covid-19. Dari rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, tentunya akan melihat apa rekomendasi yang diberikan, rekomendasi yang bersifat strategis tentunya akan diteruskan kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan/keputusan Presiden dalam bentuk memo beserta pointers, pidato, bahan rapat, bahkan rancangan peraturan yang perlu ditetapkan Presiden maupun rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, ada juga rekomendasi yang perlu diteruskan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat Sekretaris Kabinet guna ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sesuai Arahan Presiden dan sebagai upaya menyelesaikan masalah yang mengalami hambatan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Selain itu usulan rekomendasi bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dapat berisi laporan hasil rapat atau hasil kajian atas suatu usulan yang tidak perlu diteruskan kepada Presiden, tetapi cukup diselesaikan oleh Deputi atas arahan/petunjuk/disposisi Sekretaris Kabinet kepada Deputi Bidang Polhukam untuk selanjutnya ditindaklanjuti Deputi oleh para Asdep beserta Jajarannya. Dua kriteria rekomendasi yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet tersebut di atas dihitung sebagai outcome Deputi sedangkan ada juga rekomendasi yang dimasukkan dalam kategori **tidak disetujui**, bukan berarti rekomendasi yang disampaikan benar-benar tidak disetujui, tetapi lebih pada atas berkas rekomendasi tersebut Sekretaris Kabinet tidak memberikan catatan/arahan/disposisi atau berkas turun dari TU Sekretaris Kabinet tanpa ada tulisan/coretan Sekretaris Kabinet.



C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada awal Januari 2020, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp.6.525.218.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)** yang terbagi kedalam 4 (empat) kegiatan besar yang dilakukan oleh keempat unit eselon II di bawahnya yang setelah mengalami revisi untuk penanganan Covid-19 menjadi sebesar **Rp.1.981.779.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**.

Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2020 untuk pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam (periode Januari-September 2020 dan periode Oktober-Desember 2020) adalah sebesar **Rp.1.962.238.182,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** atau sebesar **99,01%**.

Tabel berikut akan menggambarkan pencapaian kinerja dan anggaran Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020, sebagai berikut:

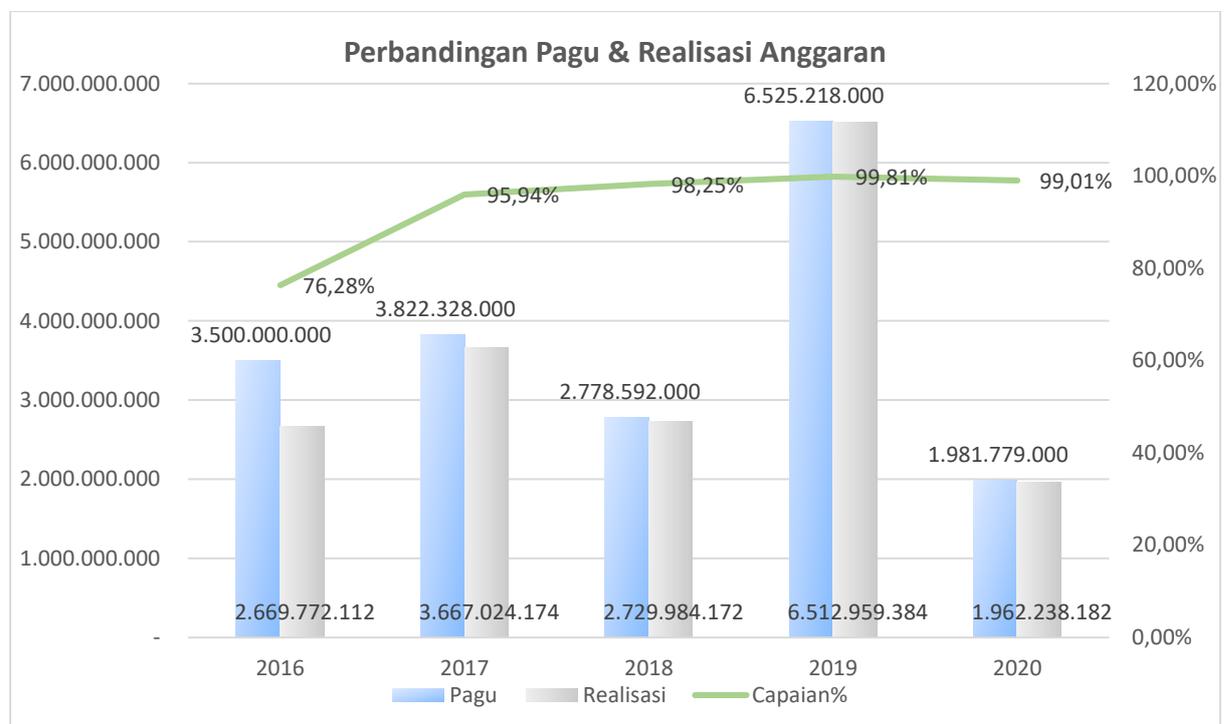
Tabel 3.28
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Polhukam
Periode Januari-September dan Oktober-Desember 2020

Sasaran	Pagu Tahun 2020 (Revisi)	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp. 1.981.779.000,-	Rp. 1.962.238.182,-	99,01	97,35
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan				

Dalam kurun satu tahun (2020) Deputi Bidang Polhukam telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik, hal tersebut terlihat dari sisi realisasi anggaran Tahun 2020 yang terserap sebesar **99,01%** dan capaian kinerjanya sebesar **97,35%**, hal tersebut memperlihatkan bahwa secara umum realiasi anggaran dan kinerja Deputi Bidang Polhukam sudah di atas 95%, meskipun dari sisi capaian kinerja masih di bawah target yang ditetapkan yakni 100%, belum tercapainya target tahun 2020 tersebut karena ada 13 rekomendasi bidang Polhukam (2,65%) yang turun dari Sekretaris Kabinet tanpa ada catatan/arahan/disposisi sehingga tidak diketahui atas berkas tersebut apakah disetujui atau tidak disetujui, sehingga dapat dikategorikan bahwa rekomendasi tersebut tidak disetujui Sekretaris Kabinet.

Sebagai gambaran perbandingan realisasi anggaran Deputi Bidang Polhukam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 s.d. 2020) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.26
Perbandingan Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2016-2020





Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pasca restrukturisasi dengan sasaran strategis yang baru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29

**Gambaran Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran
Untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020**

SASARAN STRATEGIS					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
97,35	Rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan Rekomendasi hasil pengendalian yang berkualitas di bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Output	Rekomendasi	490	477
		Input	Rupiah	1.981.779.000,- (revisi)	1.962.238.182,-
		Input rata-rata per output	Rupiah	4.050.569,-	4.113.706,-
1. Penghematan dana	=	Rp. 19.540.818,- (0,98%) dari target			
2. Efisiensi	=	- (karena input realisasi lebih besar dari target)			
3. Efektifitas	=	- % capaian sasaran < % target			

Bila melihat tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang Polhukam masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar **Rp. 19.540.818,-** atau (**0,98%**) dari pagu anggaran yang diberikan di tahun 2020 (setelah direvisi kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19), hal ini berarti sisa anggaran yang tidak digunakan sangat kecil masih di bawah 1%.

Apabila diperbandingkan dengan rata-rata anggaran yang digunakan untuk menghasilkan target output sebanyak 490 rekomendasi maka anggaran rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi sebesar **Rp. 4.050.569,-**, namun dalam realisasinya ternyata dengan anggaran yang ada jumlah capaian outcome sebanyak 477 rekomendasi sehingga anggaran untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi rata-rata sebesar **Rp. 4.113.706,-** (ada **kelebihan** sebesar Rp. 63.137,- atau 1,56% lebih besar dari target).



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputy Bidang Polhukam) Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Adapun capaian sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam tahun 2020 (untuk Periode Januari-September dan Periode Oktober-Desember) berdasarkan indikator kinerja, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik yakni sebesar 97,35%** dimana hal tersebut menandakan bahwa capaian rekomendasi bidang Polhukam hamper seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet baik yang diteruskan maupun yang tidak diteruskan (sesuai isi rekomendasi yang disampaikan). Hal tersebut memperlihatkan bahwa di tahun 2020 kegiatan penyusunan rekomendasi bidang Polhukam yang berkualitas menjadi perhatian utama, kami mengharapkan setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet disetujui untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan strategis oleh Presiden atau Pemerintah.

Sehingga seluruh **realisasi rekomendasi bidang Polhukam selama tahun 2020** ini dari 490 rekomendasi (output) yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **477 rekomendasi disetujui (outcome)** baik yang disampaikan kepada Presiden atau diteruskan kepada Kementerian/Lembaga sebanyak **264 rekomendasi (194 rekomendasi kepada Presiden dalam bentuk memo dan 70 rekomendasi dalam bentuk surat)** atau **55,35%** dan sebanyak **213 rekomendasi disetujui** untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan disetujui untuk ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam (tidak perlu disampaikan kepada Presiden) atau **44,65%** dan ada **13 rekomendasi** atau **2,65%** (12 rekomendasi berupa memo dan 1 rekomendasi berupa surat) yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet yang **turun tanpa** catatan/ arahan/disposisi kepada Deputy Bidang Polhukam sehingga terhadap ke-13 rekomendasi tersebut disimpulkan **tidak disetujui** oleh Sekretaris Kabinet.



Sebagai gambaran rinci dalam kurun waktu satu tahun **2020**, Capaian Kinerja Bidang Polhukam berupa rekomendasi (*outcome*) sebanyak **477 rekomendasi** yakni pada **Periode Januari-September 2020** sebanyak **364 rekomendasi** yang terdiri dari **215 rekomendasi** terkait perumusan kebijakan, **41 rekomendasi** terkait persetujuan prakarsa/substansi, dan **108 rekomendasi** terkait bahan/materi sidang, rapat, acara yang dihadiri Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan pada **Periode Oktober-Desember 2020** sebanyak **113 rekomendasi** yang terdiri dari **81 rekomendasi** terkait perumusan kebijakan, **4 rekomendasi** terkait rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, **10 rekomendasi** terkait penanganan permasalahan kebijakan yang mengalami hamabatan, dan **18 rekomendasi** terkait hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Selama ini rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan berkas/surat yang masuk ditambah beberapa rekomendasi atas inisiatif Kedeputian Bidang Polhukam dalam rangka melakukan kajian atas isu-isu atau permasalahan yang strategis atau monev Arahan Presiden yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga di tahun 2020. Seiring terjadinya pandemi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dan di dunia, sehingga secara kuantitas usulan rekomendasi yang dihasilkan di tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam pembatasan kegiatan di kantor dan pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan monev dan rapat koordinasi di dalam kota maupun di luar kota.

Dari sisi anggaran di tahun 2020 Deputi Bidang Polhukam telah mempergunakan anggaran sebesar **Rp. 1.962.238.182,-** (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sebesar **99,01%** dari keseluruhan target anggaran seetelah **revisi APBN 2020** sebesar **Rp. 1.981.779.000,-** (satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dengan adanya Laporan Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di tahun berikutnya.



Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Masih belum maksimalnya rekomendasi bidang Polhukam yang **disetujui untuk** disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga terkait (55,35%) bila dibandingkan dengan rekomendasi yang **disetujui untuk tidak** disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga terkait (44,65%) di tahun 2020 ini akan dijadikan sebagai acuan **untuk meningkatkan kinerja** organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja dan peningkatan kualitas analisis di lingkungan Deputi Bidang Polhukam yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsisten dan harus berorientasi *outcome* (disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga terkait), meskipun rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk tidak diteruskan kepada Presiden atau Kementerian/Lembaga juga bukan berarti rekomendasi tersebut tidak berkualitas, mengingat tidak semua permasalahan/usulan yang disampaikan harus disampaikan kepada Presiden karena harus yang bernilai strategis dan berdampak nasional yang disampaikan kepada Presiden.

Sedangkan adanya rekomendasi yang turun dari Sekretaris Kabinet yang tidak mendapatkan catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet perlu dilakukan **konfirmasi** melalui monitoring secara berkala kepada TU Sekretaris Kabinet apakah benar berkas tersebut benar-benar tidak diterima (terlambat) atau Sekretaris Kabinet memang tidak berkenan memberikan catatan pada berkas dimaksud. Selain hal tersebut tentunya ketepatan substansi dan kecepatan penyampaian (pada moment yang pas/tepat) harus mendapat perhatian bagi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputusan Bidang Polhukam dalam meningkatkan kualitas rekomendasi yang disampaikan.

Demikian halnya dengan realisasi kegiatan dan anggaran Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020 harus ditingkatkan dan dipertahankan pada tahun yang akan datang dengan didukung oleh perencanaan yang matang dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaannya serta penguatan kualitas sumber daya manusia yang memadai.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Deputy Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.1.475.000.000,-
2.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.2.450.000.000,-
3.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	Rp.1.500.218.000,-
4.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.1.100.000.000,-
	Total Anggaran	Rp.6.525.218.000,-

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1) Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		2) Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1) Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		2) Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

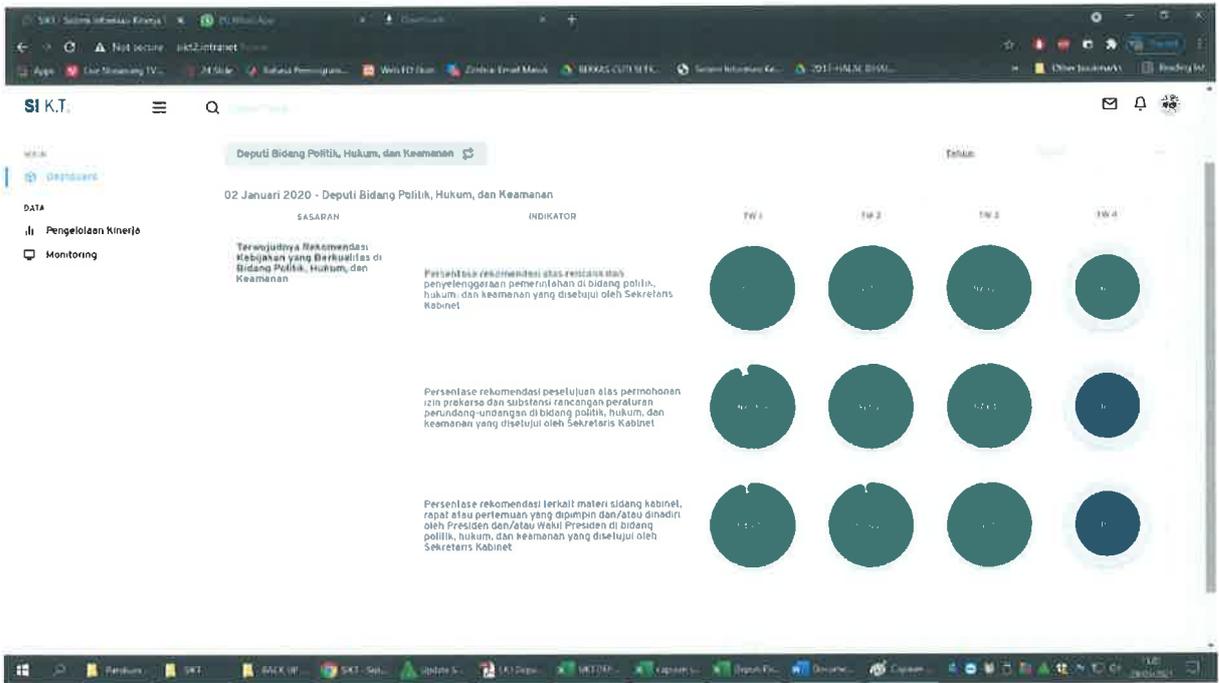
Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.250.019.411,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.334.197.035,-
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	Rp.361.008.982,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.374.139.100,-
Total Anggaran	Rp.1.319.364.528,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

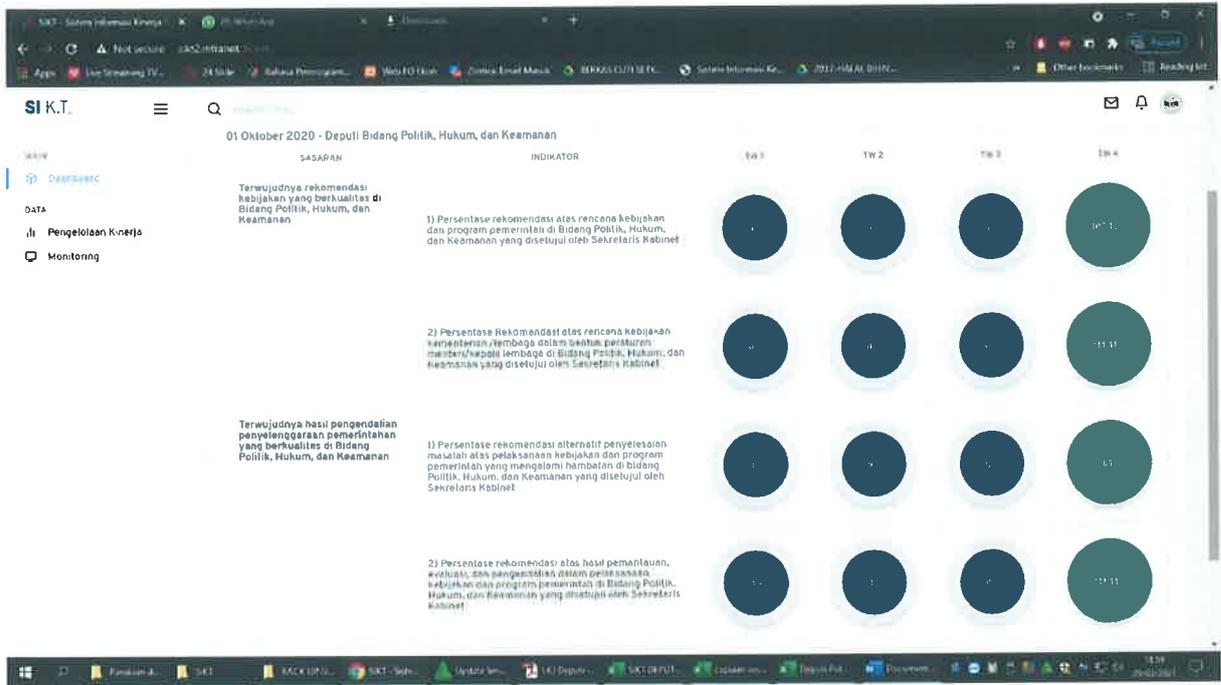


Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Tanggung Jawab: 02 Januari 2020

Status: Tidak ada berkas yang diunggah

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				TARGET ANGGARAN			
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN	DOKUMEN	TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase rekomendasi atas rancangan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100%	50	50	87	85	97.7%	97.7%		TW1	0	0
		TW2	100%	100	100	147	143	97.27%	97.27%		TW2	0	0
		TW3	100%	150	150	220	215	97.22%	97.22%		TW3	0	0
		TW4	100%	207	207	0	0	0%	0%		TW4	0	0
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100%	5	5	14	13	92.85%	92.85%				
		TW2	100%	10	10	29	28	96.55%	96.55%				
		TW3	100%	15	15	42	41	97.61%	97.61%				
		TW4	100%	23	23	0	0	0%	0%				
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100%	15	15	57	54	94.73%	94.73%				
		TW2	100%	35	35	81	77	95.06%	95.06%				
		TW3	100%	55	55	111	107	96.39%	96.39%				
		TW4	100%	74	74	0	0	0%	0%				



02 Januari 2020

Revisi: Tidak ada berkas yang diunggah

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				TARGET ANGGARAN			
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTPUT	DOKUMEN	TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan pemerintahan/hibrida dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100%	50	50	87	85	97.7%	97.7%	[Icon]	TW1	0	0
		TW2	100%	100	100	147	143	97.27%	97.27%	[Icon]	TW2	0	0
		TW3	100%	150	150	220	215	97.22%	97.22%	[Icon]	TW3	0	0
		TW4	100%	207	207	0	0	0%	0%	[Icon]	TW4	0	0
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100%	5	5	14	13	92.85%	92.85%	[Icon]			
		TW2	100%	10	10	29	28	96.55%	96.55%	[Icon]			
		TW3	100%	15	15	42	41	97.61%	97.61%	[Icon]			
		TW4	100%	23	23	0	0	0%	0%	[Icon]			
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100%	15	15	57	54	94.73%	94.73%	[Icon]			
		TW2	100%	35	35	81	77	95.06%	95.06%	[Icon]			
		TW3	100%	55	55	111	107	96.39%	96.39%	[Icon]			
		TW4	100%	74	74	0	0	0%	0%	[Icon]			

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
TAHUN 2020**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 1) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal iv) ✓ Capaian kinerja (hal 25) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 33) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 65) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 70)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC Deputi ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 13) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 7) ✓ Telah selaras (hal 7) ✓ Telah sesuai (hal 15) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran & indikator kinerja pada IKU (hal 19 dan hal 20) ✓ Telah memadai (hal 19 dan hal 20) ✓ Tidak dapat dibandingkan karena capaian kinerja tahun 2020 menggunakan dua IKU